

Sebuah komunitas tangguh: Menangani dampak COVID-19 pada penyandang disabilitas

Penyusun:

A/Prof Becky Batagol, Monash University
Dr Muhammad Junaid, Universitas Hasanuddin
Dr Sudirman Nasir, Universitas Hasanuddin
Dr Claire Spivakovsky, University of Melbourne
Rafaella Cresciani, University of Melbourne
Rafika Ramli, Universitas Hasanuddin
Betrin Natasya, Universitas Hasanuddin
Amanda Pricella Putri, Universitas Hasanuddin
Muhammad Ulil Ahsan, Universitas Hasanuddin
Dr Eugene Sebastian, Direktur Eksekutif, AIC
Helen Brown, Kepala Bidang Komunikasi dan Penjangkauan, AIC
Mary Downes, Editor, Media Xpress
Uswatul Chabibah, Penerjemah

Tanggal publikasi:

Oktober 2021

Sanggahan:

Laporan ini merupakan hasil penelitian yang didanai oleh Pemerintah Australia melalui Australia-Indonesia Centre di bawah program PAIR. Laporan ini disunting oleh Australia-Indonesia Centre (AIC). Laporan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan cakupan topik yang lengkap. Informasi dalam laporan ini tersedia dengan pemahaman bahwa AIC tidak memberikan saran profesional. Meskipun kehati-hatian telah dilakukan untuk memastikan akurasi informasi dalam laporan ini, kami tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul dari penggunaan informasi, atau dari kesalahan atau kelalaian apa pun, dalam laporan ini. Kami tidak mendukung perusahaan atau program apa pun yang disebutkan di dalam laporan, serta tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita perusahaan ataupun aktivitasnya terkait laporan ini.

PAIR:

Kemitraan untuk Penelitian Australia-Indonesia (PAIR), sebuah inisiatif dari The Australia-Indonesia Centre, didukung oleh pemerintah Australia dan dijalankan dalam kemitraan dengan Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan sejumlah organisasi dan individu dari komunitas dan industri.

The Australia-Indonesia Centre:

Australia-Indonesia Centre adalah konsorsium penelitian bilateral yang didukung oleh pemerintah, universitas terkemuka, dan industri. Didirikan pada 2014, AIC bekerja untuk memajukan hubungan antar masyarakat dan kelembagaan antara kedua negara di bidang sains, teknologi, pendidikan, inovasi, dan budaya. Kami melakukan hal tersebut melalui program penelitian untuk mengatasi tantangan bersama, serta melalui kegiatan-kegiatan penjangkauan yang mempromosikan pemahaman yang lebih besar tentang Indonesia saat ini dan memperkuat hubungan penelitian bilateral.

Untuk mengetahui lebih banyak mengenai AIC dan kegiatannya, kunjungi: ausindcentre.org

Kutipan yang dianjurkan:

Laporan ini merupakan hasil penelitian yang didanai oleh Pemerintah Australia melalui Australia-Indonesia Centre di bawah program PAIR. Kunjungi ausindcentre.org

Batagol B., Junaid M., Nasir S., Spivakovsky, C., Cresciani R., Ramli R., Natasya B., Putri A.P., Ahsan, M.U., Sebastian E., Brown H., Downes M., Chabibah, U., (2021), 'Sebuah komunitas tangguh: menangani dampak COVID-19 pada penyandang disabilitas', The Australia-Indonesia Centre.

i

Ringkasan eksekutif **P4**

1

Pendahuluan **P6**

2

Metodologi **P7**

3

Temuan **P9**

- 3.1. Dampak pandemi COVID-19 terhadap kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan **P9**
- 3.2. Strategi penanganan yang digunakan oleh para penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan dalam menghadapi COVID-19 **P14**
- 3.3. Dukungan yang telah diterima dan yang belum diterima oleh para penyandang disabilitas, baik perempuan maupun laki-laki **P16**
- 3.4. Penguatan kebijakan dan program COVID-19, gender, dan disabilitas di Sulawesi Selatan **P21**

4

Rekomendasi **P26**

- 4.1. Ketegangan tingkat mikro **P26**
- 4.2. Ketegangan tingkat makro **P27**

5

Referensi **P29**

Dengan senang hati saya menyampaikan temuan hasil riset kami dari Seri Penelitian Cepat Covid-19, Kemitraan Riset Australia-Indonesia (*Partnership for Australia-Indonesia Research/PAIR*).

Pandemi COVID-19 telah menyebar luas dan menghambat sistem ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan di seluruh dunia. Untuk mengatasi berbagai tantangan yang mendesak di Indonesia, kami telah mengumpulkan tim peneliti lintas disiplin dari kedua negara untuk mengeksplorasi dampak COVID-19 pada masyarakat. Kami fokus pada tiga bidang: kesehatan, konektivitas, dan pemulihan ekonomi.

Laporan ini memberikan bukti terbaik yang tersedia dan tepat waktu kepada komunitas kebijakan. Hal ini merupakan bagian dari strategi Kemitraan Pemerintah Australia untuk Pemulihan (*Partnership for Recovery*). Strategi tersebut bertujuan untuk memahami dan mendukung Indonesia dalam menghadapi dan pulih dari pandemi COVID-19.

Salam hangat



Dr Eugene Sebastian
Direktur Program PAIR
The Australia-Indonesia Centre

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pandemi COVID-19 telah menimbulkan banyak kesulitan bagi banyak orang. Bayangkan tantangan tambahan yang harus dihadapi oleh para penyandang disabilitas.

“Selama pandemi, kita wajib memakai masker. Hal tersebut menjadi kendala bagi saya karena menghambat saya dalam membaca gerak bibir dan berkomunikasi dengan pelanggan. Mereka mengalami kesulitan memahami kebutuhan saya dan tidak semua orang mau melepas maskernya ketika berbicara kepada saya.”

Laporan ini melihat secara detail kehidupan sehari-hari para penyandang disabilitas di Provinsi Sulawesi Selatan, baik laki-laki maupun perempuan. Penelitian ini menemukan bahwa COVID-19 menimbulkan dampak signifikan pada interaksi sosial serta kemampuan para penyandang disabilitas untuk melanjutkan pendidikan atau memperoleh penghasilan. COVID-19 telah memengaruhi cara mereka memandang diri sendiri, tetapi sekaligus menegaskan bahwa ada banyak hal perlu yang dilakukan dengan melibatkan penyandang disabilitas dalam keputusan pembuatan kebijakan.

Penelitian ini didasarkan pada survei tahun 2020 yang dilakukan oleh Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas (DPO) Respon Covid - Inklusif Indonesia. Hasil surveinya menemukan bahwa hingga 80 persen penyandang disabilitas mengalami kehilangan penghasilan, sementara 60 hingga 90 persen mengalami kesulitan belajar, terutama ketika harus menggunakan aplikasi telepon genggam dan metode daring lainnya. Komunitas disabilitas juga dikecualikan dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi mitigasi dan pemulihan COVID-19.

Laporan ini juga melihat bagaimana COVID-19 secara tidak proporsional memengaruhi perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas. Misalnya, banyak dari mereka yang tetap diminta melakukan belanja makanan saat pembatasan kegiatan masyarakat semakin diperketat.

Penelitian dengan perspektif lokal ini dirancang untuk menelusuri tantangan dan mengidentifikasi solusi yang dapat diterapkan oleh pembuat kebijakan serta masyarakat sipil di lingkungan mereka sendiri.

Laporan ini ditulis dengan pemahaman bahwa sumber daya pemerintah telah diupayakan semaksimal mungkin selama pandemi. Dan yang terpenting, laporan ini menyampaikan rekomendasi-rekomendasi yang dapat dilaksanakan dengan biaya minimal atau tanpa biaya. Lebih lanjut lagi, laporan ini menunjukkan bahwa mengadopsi pola pikir yang berkomitmen untuk inklusif dan melibatkan para penyandang disabilitas merupakan suatu upaya demi memperbaiki kehidupan yang sama berharganya seperti skema pendanaan.

Laporan ini juga mengamati strategi penanggulangan yang diadopsi oleh individu dan bantuan-bantuan yang diberikan oleh organisasi, serta membuat perencanaan untuk mendukung penyandang disabilitas melalui sejumlah kebijakan dan program.



Foto oleh Jon Tyson lewat [Unsplash](#)

Rekomendasi

Laporan ini menyampaikan tujuh rekomendasi utama sebagai prioritas pemerintah untuk membantu penyandang disabilitas:

1. **Meningkatkan metode komunikasi** untuk menyampaikan informasi penting mengenai kesehatan dan keselamatan, termasuk menginformasikan kebutuhan orang-orang dengan gangguan bicara, pendengaran, atau penglihatan.
2. **Memperluas skema subsidi pemerintah** demi memastikan para penyandang disabilitas senantiasa memiliki akses ke layanan dasar seperti air, listrik, dan komunikasi.
3. **Memperluas jangka waktu untuk akses uang tunai dan bantuan keuangan lainnya** hingga para penyandang disabilitas dapat memulihkan kembali pendapatan mereka seperti semula.
4. **Menyediakan layanan pengiriman makanan**, termasuk barang-barang kebutuhan pokok bagi orang-orang yang tidak mampu berbelanja sendiri.
5. **Mengumpulkan data yang komprehensif** sehingga distribusi bantuan dan dukungan organisasi dapat lebih tepat sasaran.
6. **Berhubungan dengan organisasi disabilitas** yang saat ini tengah memikul beban dan mendukung upaya mereka dengan pendanaan dan pelatihan.
7. **Memasukkan kebijakan khusus disabilitas dan gender** ke dalam program kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

1.0. PENDAHULUAN

Laporan ini merupakan analisis mendalam pertama tentang dampak COVID-19 pada kehidupan sehari-hari para penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan, termasuk beragam pengalaman mereka, baik perempuan maupun laki-laki. Penelitian ini dimaksudkan agar bukti-bukti yang dikumpulkan akan berkontribusi pada kebijakan dan program yang lebih sensitif terhadap gender dan budaya, sehingga dapat membantu mengurangi dampak psikologis, sosial, ekonomi, dan kesehatan akibat pandemi pada komunitas penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan. Tujuan studi adalah:

1. Menyelidiki bagaimana COVID-19 memengaruhi kehidupan sehari-hari para penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan, termasuk efek gendernya.
2. Menganalisis strategi perempuan dan laki-laki penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan menghadapi COVID-19.
3. Memeriksa dukungan apa saja yang sudah dan belum mereka terima.
4. Menjajaki cara untuk menguatkan kebijakan dan program-program pengurangan dampak COVID-19 terhadap penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan, baik laki-laki maupun perempuan.

Studi ini didasarkan pada penelitian cepat yang dilakukan Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas (DPO) Respon Covid - Inklusif Indonesia baru-baru ini. DPO menggunakan survei untuk mengetahui dampak signifikan secara finansial, psikologis, dan sosial yang diakibatkan oleh pandemi. Survei DPO mengungkapkan bahwa para penyandang disabilitas dikecualikan dari perencanaan,

“Bukti menunjukkan bahwa krisis COVID-19 memperburuk situasi yang sudah genting pada perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas, dengan konsekuensi yang dapat membahayakan jiwa.”

implementasi, pemantauan, serta evaluasi mitigasi dan pemulihan pandemi. Hasil survei tersebut antara lain:

- 80,9 persen responden setuju bahwa COVID-19 berdampak negatif pada cara mereka menilai diri sendiri dan pada interaksi sosial mereka.
- 50-80 persen responden, yang sebagian besar bekerja di sektor informal, kehilangan pendapatan selama pandemi.
- 67,97 persen siswa penyandang disabilitas melaporkan kesulitan berpartisipasi dalam pembelajaran, penggunaan aplikasi, dan metode pembelajaran daring.
- 64 persen responden menyatakan ingin berkontribusi dalam kegiatan tanggap pandemi, baik dengan membuat masker, membuat desain untuk sarana komunikasi, mengumpulkan sumbangan warga, atau berkontribusi pada keuangan mereka sendiri.

Penelitian ini melengkapi hasil survei DPO, dengan fokus pada Sulawesi Selatan dan kesengajaan menggunakan lensa gender. Bukti menunjukkan bahwa krisis COVID-19 memperburuk

situasi yang sudah genting pada perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas, dengan konsekuensi yang dapat membahayakan jiwa (UN Department of Economic and Social Affairs, 2020). Terdapat juga bukti “pandemi bayangan”, yaitu meningkatnya kekerasan terhadap perempuan sejak Maret 2020, dengan perempuan penyandang disabilitas sangat rentan mengalami kekerasan (UN Women, 2020).

Kami menggunakan pendekatan model sosial untuk disabilitas. Pendekatan ini menjauh dari pemahaman medis mengenai disabilitas, yang lebih menganggapnya sebagai masalah “kekurangan” atau “ketidaknormalan” biologis. Sebaliknya, model sosial menempatkan disabilitas sebagai kelompok tertindas, sebagaimana masyarakat mengatur dan memperlakukannya (Oliver, 2013; Chappell, Goodley dan Lawthorn, 2001). Kami juga mengambil pendekatan luas pada gender dalam penelitian ini, karena di Sulawesi Selatan, gender tidak dipahami sebagai oposisi biner atau sebagai lawan jenis (Davies, 2010, hlm. 23-25). Gender merupakan kontinum yang luas, dan kami menyatakan bahwa gender adalah suatu konsep yang cair, fleksibel, dan non-biner.

Terakhir, kami menggunakan istilah Global North dan Global South atau negara-negara Kawasan Utara dan Selatan, untuk menjauh dari Euro-Amerika Utara-sentris, dengan terminologi-terminologi developmentalis seperti ‘negara Dunia Ketiga’ dan ‘negara berkembang’. Istilah Kawasan Utara dan Selatan justru memfokuskan “hubungan kekuatan geopolitik” (Dados and Connell, 2012, hlm. 12), dengan Kawasan Utara digambarkan sebagai negara-negara yang mengeksploitasi, mengintervensi, dan menjajah negara-negara di wilayah Selatan.

2.0. METODOLOGI

Kami menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan wawancara mendalam, karena penelitian kualitatif mengutamakan makna dan nilai yang diberikan individu dan kelompok atas masalah sosial mereka sendiri (Cresswell and Cresswell, 2018, hlm. 4). Kami memilih tiga lokasi untuk pengumpulan data di Sulawesi Selatan: satu wilayah perkotaan (Kota Makassar), satu pinggiran kota (Kabupaten Gowa, satu jam perjalanan dari Makassar) dan satu pedesaan (Kabupaten Bulukumba, daerah pedalaman, lima jam perjalanan dari Makassar).

Kami mewawancarai perempuan dan laki-laki penyandang berbagai jenis disabilitas. Demi meningkatkan dukungan pemangku kepentingan, kami juga mewawancarai mereka, yaitu kombinasi antara tokoh masyarakat (formal dan informal), pejabat pemerintah yang terlibat dalam layanan disabilitas, dan pembuat kebijakan. Kami mengatur jadwal wawancara terpisah untuk setiap kategori peserta.

Untuk mengumpulkan data, kami bermitra dengan PerDIK (Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan), sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bekerja dengan penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan. Dr Ishak Salim dan Bapak Syarif Ramadhan dari PerDIK dengan kepakarannya telah membantu kami membuat desain inklusif dan metode pengumpulan data, sehingga kami dapat mengumpulkan dan menyebarluaskan bukti berkualitas tinggi. Keterlibatan dengan PerDIK memfasilitasi kerja sama yang erat antara universitas-universitas dan LSM, dengan staf PerDIK melakukan semua pengumpulan data. Kami menggunakan metode pengumpulan data inklusif untuk memastikan adanya partisipasi berarti dari perempuan dan laki-laki dengan jenis disabilitas yang



Foto oleh Paul Stickman lewat [Unsplash](#)

beragam. Kami memodifikasi metode wawancara yang tepat, menggunakan metode komunikasi yang sesuai, dan memilih lokasi pengumpulan data yang dapat diakses, sehingga memastikan para peserta merasa nyaman. Metode ini menantang karena pengumpulan data dilakukan dari jarak jauh—melalui telepon dan secara daring—mengingat kondisi pandemi COVID-19. Pembatasan mobilitas terkait pandemi dan adanya kampanye pemilu membuat pengumpulan data membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperkirakan.

Secara keseluruhan, kami melakukan 36 wawancara dengan peserta penyandang disabilitas. Kami melakukan 14 wawancara daring dengan penyandang disabilitas di Makassar (tujuh laki-laki dan tujuh perempuan), 10 wawancara di Gowa (lima laki-laki dan lima perempuan), dan 12 wawancara di Bulukumba (delapan laki-laki dan empat perempuan). Peserta wawancara menyandang berbagai jenis disabilitas termasuk disabilitas sensorik, fisik, dan intelektual. Kami juga mewawancarai sekitar 50 pemangku kepentingan, kombinasi perwakilan dinas sosial

provinsi atau kota/kabupaten, dinas kesehatan, Bappenas, LSM gender dan disabilitas, serta organisasi berbasis masyarakat lain yang menangani isu disabilitas. Kami mewawancarai 12 pejabat pemerintah dan 12 perwakilan LSM di Makassar, 10 pejabat pemerintah dan empat perwakilan LSM di Gowa, serta 10 pejabat pemerintah dan tiga perwakilan LSM di Bulukumba. Wawancara dilakukan dalam Bahasa Indonesia (dialek Makassar) dan ditranskrip oleh pewawancara. Peneliti junior di Universitas Hasanuddin menerjemahkan transkrip wawancara ke dalam bahasa Inggris. Peserta diberi nama samaran untuk menjaga kerahasiaan.

Data mentah dianalisis menggunakan pendekatan tematik (Cresswell and Cresswell, 2018; Grbich, 2005) untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul dan menjawab tujuan penelitian. Analisis dilakukan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, sedangkan interpretasi diperiksa oleh tim Australia dan Indonesia. Kami menyusun analisis berdasarkan empat tujuan penelitian.



3.0. TEMUAN

3.1. DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEHIDUPAN SEHARI-HARI PENYANDANG DISABILITAS DI SULAWESI SELATAN

COVID-19 dan tindakan-tindakan pencegahannya memengaruhi kehidupan peserta penelitian dalam banyak hal. Sementara dampak-dampak pandemi dirasakan oleh seluruh populasi, penyandang disabilitas harus menghadapi hambatan-hambatan tambahan.

Informasi yang tidak dapat diakses

Informasi tentang COVID-19 tidak secara konsisten diberikan dalam format yang dapat diakses. Siaran di televisi kurang dapat diakses oleh peserta tuli, karena siaran di televisi seringkali tidak menyediakan penerjemah bahasa isyarat dan teks terjemahan. Buruknya kualitas suara televisi juga menjadi penghalang pemahaman. Dua orang yang diwawancarai dengan gangguan pendengaran, Fadhlán (laki-laki, tuli) dan Putri (perempuan, tuli), melaporkan:

"Jika informasi disampaikan secara visual dan tanpa penerjemah bahasa isyarat, atau jika tidak ada teks terjemahan, maka akan sulit."

"Menonton berita di TV kadang tidak jelas dan volumenya kecil. Karena suara TV rendah, sulit untuk mendengar dan memahami."

Untuk mengakses informasi tentang COVID-19, para peserta, khususnya penyandang disabilitas pendengaran, beralih ke format teks pada teknologi digital seperti membaca berita di telepon genggam, atau menonton video YouTube dengan menampilkan teks. Sebagian besar peserta yang kami wawancarai memiliki akses ke telepon genggam atau komputer dan percaya diri menggunakan

teknologi digital. Tetapi bila data internet habis, maka akan timbul masalah yang signifikan. Inilah dilema yang dialami Fadhlán.

"Jika saya kehabisan kuota internet ... saya tidak dapat mengakses internet, atau membuka YouTube."

Siaran TV yang tidak dapat diakses menimbulkan kekhawatiran serius bagi orang-orang yang tidak memiliki akses tetap ke internet. Banyak penyandang disabilitas di wilayah negara-negara Selatan tidak memiliki akses ke perangkat digital. Kurangnya informasi dari sumber resmi dalam format yang dapat diakses menempatkan penyandang disabilitas pada risiko yang lebih tinggi untuk tertular virus. Peserta wawancara juga melaporkan hubungan langsung antara informasi yang tidak dapat diakses dengan munculnya perasaan cemas dan stres. Seperti yang diungkapkan Fadhlán:

"Tanpa penerjemah bahasa isyarat yang membantu saya menafsirkan informasi dalam bentuk video, saya tidak akan memahaminya, karena bahasanya berbeda. Apalagi terkadang saya merasa stres karena tidak mengerti informasinya."

Tidak tersedianya informasi yang dapat diakses mengenai perubahan regulasi dan peraturan terkait COVID-19 juga menempatkan penyandang disabilitas pada risiko berhadapan dengan polisi serta pihak berwenang lainnya. Fadhlán, yang bekerja di industri perhotelan, mengatakan dirinya tidak mengetahui bahwa toko-toko diharuskan ditutup, karena informasi tersebut tidak diterjemahkan atau diberikan dalam format teks.

"Ada instruksi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bahwa toko-toko harus tutup selama pandemi. Tetapi mereka tidak mengerti bahwa kami

membutuhkan bahasa isyarat untuk memahami kata-kata mereka, atau kita membutuhkan teks untuk dibaca."

Peserta lain, Ahmad (L, gangguan penglihatan/low vision), menyatakan bahwa meskipun "informasi COVID-19 tersedia di banyak portal berita", beberapa situs web pemerintah daerah tidak dapat diakses "karena fitur pembaca layar tidak dapat membaca informasi grafis yang ditampilkan di situs tersebut." Akibatnya, Ahmad tidak dapat mengecek situs pemerintah secara rutin sehingga tidak menyadari bahwa lingkungan tempat tinggalnya berada di "zona merah" (kota atau kabupaten dengan tingkat penularan COVID-19 tertinggi), yang informasinya mungkin disampaikan melalui peta grafis.

Salah satu peserta, Annisa (P, gangguan pendengaran), melaporkan tidak ada hambatan untuk mengakses informasi, karena ia menggunakan situs web Pemda, yang menyediakan pembaruan informasi dalam format yang dapat diakses. Annisa adalah seorang mahasiswa dan karena itu memiliki modal sosial dan budaya yang tinggi. Tampaknya tidak semua orang yang diwawancarai mengetahui cara mengakses informasi ini.

Sebagian besar peserta yang kami wawancarai mengalami hambatan dalam mengakses informasi. Namun, penting untuk dicatat bahwa semua contoh yang disebutkan merupakan contoh dengan peserta yang buta atau memiliki gangguan penglihatan, dan peserta tuli atau mengalami hambatan pendengaran. Terdapat perbedaan jelas dalam cara peserta mengakses informasi mengenai COVID-19, tergantung pada jenis disabilitas mereka. Bagi peserta tanpa cacat sensorik, tidak ada hambatan untuk mengakses informasi. Seperti yang dikatakan Nurul (P) yang pernah menderita kusta:

“Kalau informasi tentang COVID-19 selalu ditayangkan di televisi, saya kira cukup, karena kita selalu menonton TV. Informasinya juga ada di internet, dan kita juga bisa mendapatkan informasi COVID-19 dari layanan SMS.”

Hambatan komunikasi

Selama pandemi, peserta melaporkan hambatan tambahan untuk berkomunikasi di tempat kerja dan di kampus. Bagi peserta tuli, kewajiban dan aturan untuk memakai masker membuat mereka tidak dapat membaca bibir, sebuah bentuk komunikasi penting bagi orang-orang yang tidak dapat menggunakan bahasa isyarat. Kebijakan memakai masker sangat menyulitkan peserta yang bekerja di toko dan restoran, karena mereka tidak dapat memahami maksud pelanggan. Masker juga membuat para mahasiswa dan peneliti kesulitan memahami rekan-rekan mereka. Sebagaimana disampaikan Fadhlán dan Annisa:

“Selama pandemi, kita wajib memakai masker. Hal tersebut menjadi kendala bagi saya karena menghambat saya dalam membaca gerak bibir dan berkomunikasi dengan pelanggan. Mereka mengalami kesulitan untuk memahami kebutuhan saya membaca gerakan bibir mereka, dan tidak semua orang mau melepas masker ketika berbicara dengan saya.”

“Saat melakukan penelitian di kampus, saya kesulitan membaca gerak bibir karena penggunaan masker.”

Bagi mahasiswa dan pelajar, peralihan ke teknologi daring seperti Zoom terkadang membuat mereka kesulitan memahami penjelasan dosen dan guru. Annisa menjelaskan:

“Ketika saya Zoom kelas online, saya mengalami

kesulitan mendengar sehingga saya harus sangat fokus ... karena saya tuli. Sulit bagi saya untuk memahami apa yang dikatakan dosen, apalagi dosen menjelaskannya dengan cepat.”

“Kelelahan zoom” (zoom fatigue) adalah sebuah fenomena nyata akibat peningkatan fokus untuk memproses isyarat, nada suara, dan bahasa tubuh yang dikomunikasikan melalui format konferensi video, serta masalah yang muncul akibat kebisingan latar suara. Bagi mereka yang mengalami hambatan pendengaran, gangguan suara, kebisingan latar suara, dan komunikasi yang cepat atau tidak jelas kian menambah hambatan-hambatan ini. Kisah Annisa memperlihatkan tantangan tambahan yang harus ia hadapi dalam pendidikannya karena kebutuhannya tidak diakomodasi melalui, misalnya, tampilan teks.

Hanya peserta tuli atau mengalami gangguan pendengaran yang melaporkan kesulitan dengan masker dan teknologi daring. Bagi penyandang disabilitas seperti kusta, “memakai masker tidak menjadi halangan, karena sebelum COVID-19 kami juga memakai masker” (Nurul, P). Hal ini menunjukkan pentingnya memahami dan mendokumentasikan betapa pandemi memengaruhi penyandang disabilitas yang berbeda dengan cara yang juga berbeda, serta menggarisbawahi perlunya mengembangkan kebijakan untuk menangani beragam kebutuhan.

Akses terhadap kebutuhan

COVID-19 memunculkan hambatan baru dalam mengakses kebutuhan. Di Sulawesi Selatan, berbelanja ke pasar kadang dibatasi hanya sekali seminggu. Warga harus membeli bahan makanan yang cukup untuk seminggu dan membawa belanjaan dalam jumlah besar ke rumah. Seperti yang dijelaskan Annisa (gangguan pendengaran):

“Jadwal ke pasar dikurangi sehingga kita hanya bisa ke pasar seminggu sekali, artinya harus membeli lebih banyak dari biasanya. Membeli bahan makanan lebih banyak membuat kita lelah karena terlalu banyak yang harus diangkut, dan rumah cukup jauh dari pasar.”

Mengangkut bahan makanan dalam jumlah yang lebih banyak membutuhkan kekuatan dan tenaga, serta lebih banyak biaya yang harus dibayar kontan. Bagi orang-orang dengan disabilitas fisik tertentu, kebijakan pembatasan ini dapat menimbulkan dampak yang lebih besar pada kenyamanan dan kondisi fisik mereka.

Kebijakan pembatasan juga memiliki efek gender yang jelas karena perempuan dan anak perempuan cenderung mendapat tugas membeli bahan makanan. Meningkatnya kelelahan dan waktu perjalanan juga dapat menyebabkan berkurangnya partisipasi dalam pendidikan dan pekerjaan. Meskipun tidak ada peserta perempuan yang melaporkan hal ini, seorang peserta yang diwawancarai (Ahmad, L) mengatakan bahwa perempuan lebih terpengaruh oleh pandemi karena “mereka tidak dapat pergi ke pasar atau kesulitan mendapatkan akses ke pasar karena mereka takut terkena virus”. Ketakutan tertular virus di tempat umum atau tempat ramai secara tidak proporsional lebih berdampak pada perempuan; dan hal ini dapat berkontribusi pada kesulitan-kesulitan dalam mengakses makanan serta kebutuhan pokok lainnya.

Bagi peserta lain, memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan hal yang sulit karena pendapatan berkurang. Seperti yang diceritakan Nurul (bekas penderita kusta) yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga:

“Ketakutan tertular virus di tempat umum atau tempat ramai secara tidak proporsional lebih berdampak pada perempuan; dan hal ini dapat berkontribusi pada kesulitan-kesulitan dalam mengakses makanan serta kebutuhan pokok lainnya.”

“Susah ke pasar karena tidak ada uang. Bukan karena pasarnya. Ada pasar, tapi tidak ada uang.”

Kehilangan pendapatan merupakan kendala yang harus dihadapi Nurul. Kondisi ini menyebabkan ia kesulitan menafkahi keluarga, meskipun menerima bantuan dari anak-anaknya dan bantuan resmi dari pemerintah. Nurul juga menceritakan kesulitan yang dihadapi oleh seorang penderita kusta di komunitas kusta:

“Pengidap kusta di Jalan Sunu sama sekali tidak punya penghasilan. Listrik dan air dimatikan... Akhirnya, dia mengambil listrik dari tetangganya. Dia juga mengambil air dari sumur tetangga, saya kasihan sekali tentang ini. Dan dia memiliki lima anak yang masih kecil.”

Kisah sedih yang mengusik perasaan ini mencerminkan hasil temuan penelitian cepat. Dilaporkan bahwa hilangnya pendapatan hingga 80 persen mengakibatkan beberapa peserta kami kehilangan kemampuan untuk mengakses keperluan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, sehingga menimbulkan penderitaan dan tekanan.

Hampir semua peserta perempuan yang diwawancarai melaporkan turunnya pendapatan, sementara hanya satu peserta laki-laki yang mengalami penurunan pendapatan. Sampel kami kecil sehingga kami tidak dapat mengklaim bahwa temuan dengan efek gender ini dapat digeneralisasikan. Namun, kita tahu dari penelitian sebelumnya bahwa perempuan di Indonesia dan perempuan penyandang disabilitas lebih mungkin kehilangan pekerjaan dan mengambil tanggung jawab lebih besar di masa pandemi, sebuah tren yang meningkatkan dampak kemiskinan bagi perempuan penyandang disabilitas (Setyonaluri, 2020; UN Women, 2020, hlm. 4; Plan International, 2020, hlm. 10).

Akses ke layanan kesehatan yang memadai juga menimbulkan masalah bagi sebagian orang. Salah satu peserta wawancara, Mego (L, skizofrenia) melaporkan bahwa COVID-19 menghalangi konsultasi yang ia perlukan dengan psikiaternya. Hal ini menjadi masalah karena Mego tidak hanya membutuhkan obat tetapi juga konseling. Peralatan dan layanan medis sangat penting untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, namun pandemi menghalangi akses ke kebutuhan-kebutuhan ini.

Kecemasan dan stres

Pandemi menimbulkan kecemasan dan stres yang berat bagi sebagian besar peserta. Berita jumlah orang yang meninggal, efek yang dialami penderita COVID-19, dan ketakutan-ketakutan terkait dengan aktivitas keluar rumah, berada di keramaian, dan tertular virus, semua berkontribusi pada perasaan tertekan dan kewalahan bagi para peserta. Annisa, Putri, Nurul, dan Ahmad mengungkapkan:

“Pada awalnya, banyak sekali orang meninggal. Informasi itu membuat takut orang-orang, termasuk saya.”

“Saya lebih khawatir karena pandemi ini menyebar dengan cepat dan tidak ada obatnya. Saya merasa agak stres karena saya sudah lama tidak keluar rumah, saya takut keramaian.”

“Merasa kurang aman dan lebih takut, ya. Kita tidak tahu siapa yang terinfeksi COVID-19 dan siapa yang tidak, terutama jika berada di luar rumah.”

“Saya takut tertular.”

Seperti telah disebutkan sebelumnya, kurangnya informasi yang dapat diakses mengenai COVID-19 berhubungan langsung dengan semakin meningkatnya kecemasan dan stres. Mendapatkan informasi yang memadai mengenai COVID-19 dapat mengurangi kecemasan. Seperti yang dikatakan Fadhlan:

“Pada awal COVID, tingkat kekhawatiran saya tinggi, tetapi kemudian, setelah menerima informasi, saya menjadi lebih santai.”

Para peserta juga merasa rencana dan cita-cita mereka terganggu oleh pandemi, yang menimbulkan penderitaan lebih lanjut. Annisa, mahasiswa yang penelitiannya sempat tertunda tiga bulan karena lockdown, mengaku merasa “terganggu mentalnya karena semua target dan rencana yang sudah disusun menjadi molor”. Terutama bagi kaum muda dan pelajar, potensi pandemi untuk menggagalkan cita-cita pendidikan dan karir menjadi perhatian khusus.

Ketakutan dan kecemasan juga muncul dari kebutuhan untuk mengakses layanan medis dan kesehatan selama pandemi. Para peserta khawatir tertular COVID-19 di fasilitas kesehatan. Nurul menceritakan pengalamannya ketika mengunjungi Puskesmas:

“Saya takut masuk Puskesmas. Suatu hari seseorang tanpa gejala masuk dan langsung

dijemput oleh perawat dengan APD lengkap dengan ambulans ... di Puskesmas. Saat itu saya jadi takut untuk ke sana.”

Melihat orang tanpa gejala “dijemput” di Puskesmas dan diperlakukan sebagai penderita COVID-19 semakin mempertegas kecemasan yang sebelumnya diungkapkan Nurul, bahwa tidak ada cara untuk mengetahui siapa yang tertular atau tidak saat berbaur dengan warga. Para peserta wawancara melaporkan mengalami tingkat kelelahan yang lebih tinggi pada saat mengunjungi Puskesmas, karena masa tunggu yang lebih lama. Nurul menjelaskan:

“Sebelum masuk kita harus cuci tangan, sedangkan di dalam kita duduk dengan menjaga jarak 1 meter. Lalu kalau mau masuk ruang dokter kita tidak bisa langsung masuk. Kita disuruh menunggu, kita harus mengantri, masuk satu per satu... Tentu itu menghambat kita, karena waktu kita tidak termasuk antrian, di mana kita harus menunggu lebih lama. Ini lebih memakan waktu. Dulu, kalau saya berangkat dari rumah jam 7 pagi saya bisa pulang jam 9. Sekarang, kalau saya sampai jam 7, saya pulang jam 10, 11 atau 12.”

Terakhir, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, ketidakmampuan untuk membeli makanan dan kebutuhan pokok lainnya menimbulkan kecemasan luar biasa. Kondisi tersebut juga menimbulkan pertanyaan di dalam benak orang-orang yang diwawancarai perihal bagaimana mereka akan bertahan hidup. Nurul, yang penghasilannya berkurang drastis, menyampaikan bahwa dirinya “khawatir besok mau makan apa, beli apa untuk besok... Tentu susah banget, susah pergi ke luar, susah ke mana-mana. Itulah kehidupan

“Bekerja/belajar dari rumah bisa jadi tidak memungkinkan bagi orang yang membutuhkan peralatan khusus untuk belajar, atau yang tinggal di rumah yang sempit, atau lingkungan rumah tangga yang tidak aman.”

sekarang ini.” Dampak pandemi terhadap pendapatan akan dibahas secara lebih rinci berikut ini.

Dampak pada pendidikan dan pekerjaan

Kami mewawancarai dua pelajar—Annisa (gangguan pendengaran), yang duduk di bangku kuliah, dan Ahmad (gangguan penglihatan/low vision), masih duduk di bangku sekolah menengah. Keduanya melaporkan bahwa COVID-19 telah memengaruhi pembelajaran dan pendidikan mereka secara signifikan. Annisa menyampaikan dirinya ingin melakukan penelitian, tetapi kampusnya ditutup karena kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Peraturan untuk tetap berdiam di rumah dan PSBB sangat menghambat kemampuan mahasiswa untuk melanjutkan penelitian. Bekerja/belajar dari rumah bisa jadi tidak memungkinkan bagi orang yang membutuhkan peralatan khusus untuk belajar, atau yang tinggal di rumah yang sempit, atau lingkungan rumah tangga yang tidak aman. Pekerjaan atau penelitian yang dibatasi tenggat pun jadi tertunda. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, pembelajaran secara daring yang tidak dilengkapi teks menghambat

pendidikan Annisa. Temuan ini sudah dilaporkan dalam penelitian cepat. Para peserta penelitian cepat menyatakan bahwa pendidikan jarak jauh pada umumnya tidak inklusif bagi siswa penyandang cacat.

Ahmad menghadapi sejumlah hambatan untuk melanjutkan sekolah menengah secara jarak jauh. Ia menyebutkan adanya dampak kesehatan akibat stres belajar daring yang dialami oleh banyak siswa. Siswa harus mengerjakan tugas yang “terlalu banyak”, yang menimbulkan kebingungan. Bagi Ahmad, stres membuatnya sakit kepala, yang berarti ia memerlukan beberapa kali istirahat atau tidur siang ketika sedang belajar, untuk menghilangkan sakit kepalanya.

“Punya terlalu banyak tugas dapat menyebabkan depresi jika tidak diatur dengan baik, terutama jika saya terlambat mengumpulkan atau melewati tenggat.”

Dampak signifikan lainnya adalah tekanan untuk mengerjakan tugas secara daring, tanpa bantuan yang memadai dari guru. Ahmad mengatakan:

“Mengetahui pembelajaran online, berdasarkan informasi yang saya dapat, banyak (penyandang disabilitas) yang mengeluh.”

Jelas, pengalaman sulitnya belajar jarak jauh tidak hanya dialami Ahmad, siswa penyandang disabilitas lain juga mengeluhkan hambatan ini. Muncul juga konsekuensi sosial akibat peralihan ke pembelajaran daring ini. Ahmad menyampaikan bahwa interaksinya dengan teman dan guru “tidak berjalan dengan baik”.

Selain berdampak pada pendidikan, pandemi juga membuat sebagian peserta kehilangan pendapatan. Putri (tuli) mengelola sebuah toko

online yang menjual kue dan busana muslimah. Ia mengalami penurunan tajam dalam penjualan dan omset. Putri kehilangan setidaknya 75 persen pendapatan, penurunan terbesar yang dilaporkan di antara para peserta yang diwawancarai.

“Sebelum pandemi COVID-19 saya punya omzet 2 juta rupiah. Namun, ketika pandemi terjadi, turun menjadi 500.000 dan bahkan dalam dua bulan terakhir tidak ada pesanan sama sekali.”

Nurul (bekas penderita kusta), sejak sebelum pandemic bekerja sebagai tukang parkir dan kini ia tetap bekerja sekali seminggu. Ia melaporkan penurunan upah 50 persen.

“Ini benar-benar turun, terutama sejak pandemi ... saya biasanya mendapatkan 100.000 sehari, sekarang saya hanya mendapatkan 50.000.”

Penutupan pertokoan dan bisnis berdampak signifikan pada jumlah kendaraan yang perlu parkir di dekat kawasan perbelanjaan. Kondisi ini berakibat pada pendapatan Nurul sebagai juru parkir. Namun, penurunan pendapatan ini pada awalnya tidak menyebabkan penurunan pajak yang harus ia bayarkan:

“Saya langsung ke kantor pajak yang mengurus parkir, agar pajak parkir bisa diturunkan karena jumlah kendaraan berkurang... Kami tidak mampu membayar jika pajaknya terlalu tinggi... Kami harus melobi, karena jumlah kendaraan berkurang, tetapi kami masih harus membayar pajak.”

Lobi Nurul efektif. Pajak harian diturunkan dari 25.000 rupiah per lokasi menjadi 10.000 rupiah. Namun, melobi membutuhkan energi, ketekunan, dan pengetahuan khusus—suatu sumber daya yang tidak dimiliki semua penyandang disabilitas.

“Hasil wawancara kami mengungkapkan bahwa para penyandang cacat seringkali memiliki pekerjaan di tempat umum dan berhadapan langsung dengan pelanggan, aktivitas yang berbahaya di masa pandemi.”

Meskipun pengeluaran berkurang, pendapatan Nurul juga berkurang secara signifikan.

Narasumber lain, Melati (P, buta) melaporkan penurunan tajam pada pendapatannya sebagai tukang pijat.

“Sebelum pandemi saya bisa mendapatkan cukup uang untuk membeli makanan untuk keluarga saya. Saya punya uang setiap hari dari memberikan pijatan kepada orang-orang, kadang-kadang dua atau bahkan empat orang sehari. Karena COVID-19, orang tidak bisa memanggil saya untuk pijat. Saya dan suami saya bekerja sebagai tukang pijat, tetapi sejak Maret, kami tidak bisa bekerja.”

Hasil wawancara kami mengungkapkan bahwa para penyandang cacat seringkali memiliki pekerjaan di tempat umum dan berhadapan langsung dengan pelanggan, aktivitas yang berbahaya di masa pandemi. Jenis-jenis pekerjaan mereka sesuai dengan hasil identifikasi penelitian kuantitatif cepat. Pekerjaan-pekerjaan seperti juru parkir, pelayan, terapis pijat, dan menjalankan toko merupakan sejumlah industri yang paling terpuak oleh pandemi.

Terdapat juga perbedaan gender di sini. Narasumber yang

melaporkan kehilangan pendapatan adalah perempuan, sedangkan narasumber laki-laki melaporkan tidak ada penurunan pendapatan (kecuali Ahmad, seorang siswa sekolah menengah, yang uang sakunya berkurang, mencerminkan gawatnya kondisi keuangan keluarganya).

Sampel kami kecil, sehingga kami tidak dapat mengklaim temuan yang dapat digeneralisasikan. Tetapi bahwa perempuan penyandang disabilitas cenderung menghadapi situasi keuangan yang lebih genting setelah terjadinya bencana sesuai dengan literatur internasional. Mengutip hasil penelitian cepat, perempuan kehilangan pendapatan antara 50-75 persen. Narasumber-narasumber lain yang berhasil mempertahankan jam kerja dan kondisi seperti sebelum pandemi melaporkan tingkat pendapatan yang stabil.

Ketakutan, kekerasan, dan isolasi

Sebagian besar peserta wawancara tidak melaporkan mengalami kekerasan, kekangan, atau pemaksaan selama pandemi. Namun, kata Putri, aturan berdiam diri di rumah sempat membuat ibunya stres, dan ini membuatnya mudah marah.

“Saya terkadang takut pada ibu saya, karena dia jarang keluar rumah dan itu membuatnya stres. Jadi, dia sering marah.”

Meskipun Putri tidak melaporkan terjadinya insiden kekerasan, dia tampak pendiam dan tertekan selama wawancara, terutama ketika ada ibunya. Seorang bibi dan penjaga peserta wawancara dengan cacat mental menyampaikan bahwa ibunya menjadi lebih pemarah dan kadang-kadang memukulinya.

“Memang tahun ini lebih menegangkan dan sulit karena COVID-19.”

Kekerasan dapat menjadi topik yang sulit didiskusikan dan umumnya tidak selalu dilaporkan oleh penyandang disabilitas yang bergantung pada penjaga, yang bisa jadi juga pelaku kekerasan. Meskipun penelitian kami tidak menunjukkan kekerasan yang meluas, kemungkinan tingkat kekerasan dan penganiayaan yang sebenarnya terhadap penyandang disabilitas selama pandemi tidak tercatat.

COVID-19 juga memperburuk isolasi yang dialami peserta wawancara. Putri, yang kontakannya sudah sangat sedikit dengan orang-orang di luar keluarga dekatnya, melaporkan bahwa opname di rumah sakit selama pandemi menjadi jauh lebih tidak menyenangkan, karena tidak boleh ada pembesuk.

"Satu-satunya adalah—karena pandemi, saya tidak bisa dikunjungi selama dirawat di rumah sakit. Karena ada pembatasan, keluarga saya tidak diizinkan untuk berkunjung. Jadinya rumah sakit jadi sepi..."

Pembatasan perjalanan juga mengisolasi penyandang disabilitas dari keluarga dan jaringan pendukung lainnya. Nurul menggarisbawahi bahwa "ketika mengunjungi keluarga, kami terhambat. Karena selama Pembatasan Sosial Berskala Besar, kami dilarang pergi ke keluarga kami di desa." Ahmad juga merasa terisolasi dan dibatasi. Ia mengatakan, "Apa yang ingin saya lakukan saat ini, tetapi terhalang oleh pandemi, adalah bertemu banyak orang."

Ketakutan akan terjadinya kejahatan juga meningkat. Nurul mengatakan, "Kalau misalnya ada teman minta diantar ke suatu tempat dengan sepeda motor, saya bilang 'takut', apalagi malam hari. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada

kami." Ketakutan akan terjadinya kejahatan, terutama di malam hari, diperparah oleh berita yang didengar Nurul bahwa anak temannya mengalami perampokan.

Ketakutan akan terjadinya kejahatan adalah fenomena gender, dengan peserta perempuan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan suatu masalah. Salah satu peserta laki-laki, Ahmad, mengatakan, "Saya merasa aman. Saya tidak berpikir ada kejahatan di sekitar asrama dan lingkungan sekitar." Kesenjangan tersebut kemungkinan besar berasal dari mitos bahwa ruang publik aman bagi laki-laki tetapi berbahaya bagi perempuan. Padahal kenyataannya, perempuan lebih mungkin mengalami kekerasan di rumah, dan laki-laki lebih mungkin mengalami kejahatan di ranah publik.

Nurul juga melaporkan mengalami penipuan. Dia menerima pesan teks yang mengatakan bahwa dirinya menerima bantuan pemerintah. Namun ketika Nurul pergi ke bank untuk memeriksa, dia mendapati bahwa pesan tersebut sumbernya tidak resmi.

"Beberapa hari yang lalu ada SMS yang mengatakan saya mendapat bantuan [keuangan] COVID-19, 'tolong hubungi agen BRI terdekat'. Jadi, saya pergi ke bank untuk memeriksa dan tidak ada apa-apa. Kata bank, 'Coba lihat, ini dari nomor ponsel biasa, bukan dari BRI. Kalau BRI yang langsung memberi tahu, itu benar, Bu.'"

Meningkatnya kebutuhan masyarakat umum akan bantuan dan layanan pemerintah selama pandemi menyebabkan peningkatan terjadinya penipuan dan phishing online. Karena kehilangan pendapatan dan mengalami kesulitan keuangan, penyandang disabilitas memiliki risiko lebih tinggi menjadi sasaran penipuan semacam itu.

Pada akhirnya, pandemi berdampak kepada penyandang disabilitas dalam banyak hal. Walaupun efek-efek pandemi begitu negatif, komunitas disabilitas di Sulawesi Selatan ternyata kreatif dan tangguh, serta telah merancang banyak strategi penanganan, seperti yang akan dibahas berikut ini.

3.2. STRATEGI PENANGANAN YANG DIGUNAKAN OLEH PARA PENYANDANG DISABILITAS DI SULAWESI SELATAN DALAM MENGHADAPI COVID-19

Narasumber kami mengembangkan sejumlah strategi yang inovatif dan dinamis untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh COVID-19. Berikut adalah beberapa strategi utama.

Strategi komunikasi

Banyak perempuan dan laki-laki penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan mengembangkan strategi disabilitas-spesifik (sesuai jenis disabilitasnya) untuk merespons disrupsi akibat COVID-19. Misalnya, penyandang disabilitas pendengaran yang mengandalkan membaca bibir merespons kewajiban pemakaian masker dengan mengembangkan metode komunikasi lain, seperti menggunakan telepon genggam dengan cara berbeda. Seperti yang diceritakan Putri (tuli):

"Kadang-kadang ketika berbicara dengan orang, saya mengetik terlebih dulu di HP untuk memberi tahu mereka bahwa saya menggunakan alat bantu dengar."

Telepon genggam sangat berguna untuk membantu para peserta mengakses informasi. Annisa (gangguan pendengaran)

menggunakan aplikasi transkripsi dan web captioner untuk melanjutkan belajarnya:

"Dampak [pandemi] yang saya rasakan pada pendidikan adalah sulitnya mengakses komunikasi online. Yang saya lakukan untuk merespon dampak ini adalah dengan menggunakan aplikasi transkripsi dan web captioner [di kelas Zoom]. Jika jaringan tidak mendukung saya, saya mencari seseorang yang dapat membantu saya untuk menerjemahkan materi."

Namun, sebagaimana cerita Annisa, terkadang teknologi saja tidak dapat memfasilitasi sebuah komunikasi yang utuh. Dalam situasi ini, beberapa orang dengan gangguan pendengaran menggunakan strategi lain untuk mendapatkan bantuan yang mereka perlukan untuk dapat sepenuhnya berkomunikasi dan berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari.

"Saya menggunakan aplikasi transkripsi atau web captioner di HP. Biasanya saya juga meminta bantuan orang-orang yang ada di dekat saya saat itu untuk mendengarkan penjelasan dosen dan kemudian menjelaskan kembali kepada saya. Kalau saya mau ketemu dosen, saya minta teman saya menemani saya supaya ada yang bisa bantu menjelaskan lagi, apalagi kalau dosen berbicara dengan suara pelan."

Tetapi meskipun orang-orang dengan gangguan pendengaran menggunakan strategi seperti meminta bantuan orang lain untuk menghadapi efek pandemi yang melumpuhkan ini, pendekatan tersebut bukan tanpa masalah. Strategi ini membutuhkan orang lain yang bersedia membantu, dan hal itu tidak selalu terjadi, terutama ketika orang lain yang dimintai bantuan tidak mengenal

individu penyandang disabilitas. Masalah ini terutama terlihat pada penyandang disabilitas yang bekerja di toko atau restoran dan perlu berkomunikasi dengan pelanggan. Seperti yang dijelaskan Fadhlán (tuli), terkadang orang lain tidak bersedia mencoba bentuk komunikasi lain:

"Biasanya, saya meminta mereka melepas masker atau membuat catatan tertulis. Jika pelanggan tidak ingin melepas masker, saya akan meminta mereka untuk menuliskan pesannya... Jika mereka tidak ingin melepas maskernya atau menuliskan apa yang mereka pesan, saya akan meninggalkannya sendiri. Saya tidak mau peduli."

Pernyataan ini mengingatkan bahwa bagi penyandang disabilitas, yang sebenarnya membuat tidak mampu bukanlah gangguan tertentu pada diri mereka. Keengganan orang lain menggunakan bentuk interaksi lain yang sama-sama diterima itulah yang sebenarnya melumpuhkan para penyandang disabilitas.

Mendukung orang lain

Beberapa narasumber menyebutkan bahwa mereka saling membantu para penyandang disabilitas selama COVID-19. Dukungan yang diberikan biasanya ditargetkan, yaitu orang-orang di dalam komunitas disabilitas tertentu membantu mengatasi tantangan yang dihadapi teman-teman lain di komunitasnya. Fadhlán, misalnya, menyebutkan kegiatannya membantu teman-teman tuli untuk mengumpulkan informasi mengenai penyandang disabilitas yang sudah lansia. Nurul (mantan penderita kusta) juga membantu penderita kusta lainnya.

"Ada anak penderita kusta (tetangga saya). Saya yang mengambilkan obat untuk dia di Puskesmas. Ada juga orang di Kumala yang meminta bantuan

saya. Dia sudah lulus SMA, tapi tidak punya kendaraan, makanya kami di tim Permata membantunya ke Puskesmas... Sebagai sesama OYPMK (orang yang pernah mengalami kusta), apalagi dia masih muda, kasihan sekali dia. . Dia cantik dan kustanya tidak terlihat."

"Tapi di tubuhnya ada bintik-bintik merah. Makanya saya selalu menyemangatnya, mengingatkannya untuk minum obat, dan mandi secara teratur. Dia juga bingung; dengan kondisi seperti itu, di mana dia bisa bekerja? Saat ini dia sudah menjalani pengobatan selama enam bulan... Saya beri saran, saya dengarkan ceritanya, saya ingatkan dia untuk tidak stres, karena jika dia stres, bintik-bintik merah akan muncul lagi. Dia benar-benar ingin bekerja tetapi saya menyuruhnya untuk fokus dulu pada pengobatannya."

Sebagaimana telah kita ketahui dari tanggapan atas pertanyaan penelitian pertama, anak muda yang dibantu Nurul selama pandemi ini tidak sendirian dalam keprihatinan terkait pekerjaan. Ini membantu menjelaskan garis yang mulai ditarik oleh penyandang disabilitas antara membantu penyandang disabilitas lain dalam komunitasnya untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sehari-hari dan untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka.

Annisa menceritakan pekerjaan yang dia lakukan di komunitasnya untuk membantu orang lain yang kondisinya rentan akibat pandemi. Annisa membantu mendistribusikan masker dengan komunitas di desanya. Ia juga mengumpulkan donasi untuk membeli lebih banyak masker. Organisasi-organisasi penyandang disabilitas juga telah memperkuat hubungan ini, yaitu mendukung anggota komunitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari, serta untuk meningkatkan kondisi ekonomi

mereka. Sebagaimana dijelaskan Indah (P, tuli) berikut:

“Hanya ada swadaya dari organisasi itu sendiri. Misalnya, kami membantu memberikan pelatihan bagi orang tuli untuk membuat tali pengait masker. Saya mengajari mereka cara membeli dan memilih bahan yang bagus. Para penyandang disabilitas yang sudah terlatih sudah memulai bisnis yang berhubungan dengan menjahit.”

Sementara para penyandang disabilitas dan organisasi-organisasi disabilitas telah berinisiatif memainkan peran positif untuk membantu sesama penyandang disabilitas selama pandemi—bahkan menciptakan peluang baru—hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan: bantuan lain apa yang sudah tersedia? Kami mengeksplorasi hal ini secara lebih rinci di bagian berikutnya.

3.3. DUKUNGAN YANG TELAH DITERIMA DAN YANG BELUM DITERIMA OLEH PARA PENYANDANG DISABILITAS, BAIK PEREMPUAN MAUPUN LAKI-LAKI

Umumnya, dukungan pemerintah tidak dapat diakses dan/atau tidak memadai. Akibatnya, selama pandemi, para narasumber mengandalkan dukungan informal dari keluarga, teman, komunitas, dan organisasi disabilitas.

Dukungan Informal

Beberapa orang yang diwawancarai menerima bantuan dari anggota keluarga besar, atasan/majikan, dan komunitas mereka dalam bentuk dukungan sehari-hari, bantuan makanan dan keuangan. Putri (tuli) tinggal

serumah dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Dia lajang dan tidak memiliki anak. Anggota keluarganya yang memasak untuknya dan menemaninya bila keluar rumah. Sementara kebutuhan dasarnya masih terpenuhi selama COVID-19, pandemi membuatnya lebih terisolasi karena dia lebih jarang keluar rumah. Bantuan yang dilaporkan Putri selama pandemi sepenuhnya berasal dari keluarganya. Meskipun terjadi penurunan yang signifikan dalam omset bisnis online-nya, satu-satunya bantuan tambahan yang dia terima adalah dari ibu angkatnya. Meskipun Putri tahu ada Program Prakerja pemerintah, dia tidak mendaftar.

Fadhlan tetap bekerja sebagai pramusaji selama pandemi. Dia tetap bisa memberikan uang kepada orang tuanya—Fadhlan tinggal bersama orang tua. Dia tidak menerima bantuan dari pemerintah karena dia tidak menerima informasi mengenai bantuan dari kecamatan. Dia mengatakan temannya menerima informasi tentang bantuan pemerintah, tetapi informasi tersebut tidak diperoleh Fadhlan. Justru, majikannya membantunya dengan memberikan bahan makanan, yang “cukup untuk kebutuhan sehari-hari”.

Demikian pula Melati (P, buta) memperoleh dukungan besar dari keluarga, tetangga, dan para pelanggan jasa pijatnya. Mereka memberikan bahan makanan seperti beras, gula, mi instan, sayur, dan telur. Melati kehilangan seluruh penghasilannya karena dia dan suaminya bekerja memberikan jasa pijat yang harus tutup selama masa pandemi.

“Saya menganggap diri saya dan keluarga saya beruntung memiliki banyak anggota keluarga dan tetangga yang membantu. Pagi ini, salah satu tetangga saya menaruh

sejumlah telur dan sayuran di depan jendela saya. Dua hari yang lalu, orang baik yang sering menelepon saya untuk dipijat juga datang dan memberi saya sekantong beras. Kerabat saya juga membantu saya selama bulan-bulan yang sulit ini.”

Tetangga, keluarga, dan teman memberikan bantuan penerjemahan dan penafsiran yang penting untuk mengisi kurangnya informasi penting mengenai pandemi. Di sini, temuan kami mengkonfirmasi temuan-temuan dari penelitian cepat DPO bahwa keluarga, masyarakat, dan otoritas lokal seperti pemerintah desa sangat penting dalam mengkomunikasikan informasi penting mengenai pandemi dalam bentuk yang dapat diakses, terutama bagi penyandang disabilitas di daerah pedesaan. Fadhlan kesulitan memahami informasi resmi yang disampaikan melalui audio tanpa teks atau tanpa penerjemah bahasa isyarat:

“Ada instruksi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar toko-toko tutup selama pandemi. Tetapi mereka tidak mengerti bahwa kita membutuhkan bahasa isyarat untuk memahami mereka, atau kita membutuhkan teks untuk dibaca. Jadi kita harus meminta bantuan tetangga kita.”

Indah juga menyampaikan bagaimana teman-teman tulinya saling memberi bantuan penting untuk diri mereka sendiri selama pandemi dan berbagi informasi tentang bantuan pemerintah. Buruknya komunikasi terkait program pemerintah menunjukkan pentingnya bantuan dari komunitas disabilitas mengenai informasi bantuan pemerintah. Penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan dukungan informal akan ketinggalan informasi atau tidak terdaftar.

“Teman-teman tuli juga mendapat bantuan BLT 600 (Bantuan Langsung Tunai). Informasi terkait bantuan ini didapat dari teman-teman tuli yang saling menginformasikan. Informasinya harus lebih merata karena ada teman yang baru tahu tentang bantuan setelah pendaftaran ditutup.”

Teman dan keluarga juga memainkan peran penting dalam membantu mengatasi kesulitan komunikasi selama transisi ke pembelajaran online. Ahmad (gangguan penglihatan) meminta teman atau keluarga untuk membantu membacakan informasi mengenai COVID-19 online. Ia akan menyerah ketika tidak ada yang membantu. Annisa (gangguan pendengaran), seorang mahasiswa, merasa kuliah online sangat sulit karena dia tidak bisa menggunakan teknik biasa untuk memahami dosen. Saat belajar online, Annisa membutuhkan bantuan dari orang-orang di sekitarnya untuk berpartisipasi dalam pendidikannya. Bantuan informal ini sangat penting ketika layanan teks online tidak berfungsi.

Dari data tersebut terlihat bahwa bantuan informal dari keluarga, tetangga, dan teman sangat penting untuk bertahan selama pandemi. Bantuan informal menutup kesenjangan akibat dukungan pemerintah yang tidak memadai serta membantu peralihan ke kehidupan daring yang sebagian besar tidak memperhitungkan kebutuhan penyandang disabilitas.

Dukungan dari organisasi disabilitas

Para narasumber yang diwawancarai menerima dukungan dari organisasi disabilitas dan menganggap bantuan tersebut cukup. Dukungan yang mereka terima komprehensif, termasuk barang-barang seperti sembako, barang-barang perlindungan

kesehatan seperti masker dan pembersih tangan, serta pelatihan di kegiatan-kegiatan yang menghasilkan uang untuk menyokong diri mereka sendiri selama pandemi. Dari sampel kecil kami, tampak bahwa dukungan dan program yang ditawarkan melalui organisasi disabilitas tidak secara eksplisit berfokus pada gender. Namun, dukungan dan program tersebut memiliki dampak gender.

Dukungan materi dan barang-barang perlindungan kesehatan merupakan bagian penting dari bantuan tersebut. Organisasi disabilitas Sulawesi Selatan seperti Astra, PerDIK, PKK, Tenoon, dan Gerkatin Sulsel mengatur pembagian sembako kepada anggotanya para penyandang disabilitas. Fadhlani menyampaikan bahwa “bantuan ini sangat membantu dan saya merasa sudah cukup”.

Menurut Indah, sekitar Maret 2020, yaitu bulan-bulan awal pandemi, beberapa organisasi disabilitas mungkin belum menawarkan layanan dan bantuan. Annisa menganggap pembagian masker dan hand sanitiser “sangat membantu dalam melakukan aktivitas selama COVID-19.” Komunitasnya mengumpulkan uang dari sesama anggota pemuda untuk membeli masker dan dibagikan di desanya. Dengan dampak pandemi yang masih dirasakan di Sulawesi Selatan, Indah, ketua organisasi disabilitas Makassar, menegaskan kembali betapa penting untuk terus memberikan dukungan materi bagi para penyandang disabilitas:

“Program bantuan seperti pemberian sembako harus tetap dilaksanakan karena sangat penting bagi teman-teman tuli yang terdampak. Karena bantuan sembako terbatas, tidak semua penyandang disabilitas tuli mendapatkan bantuan ini.”

Dukungan emosional dan moral juga penting, termasuk dengan menghubungkan anggota komunitas yang terisolasi secara daring. Hal ini bermanfaat bagi penyandang disabilitas sekaligus memberikan informasi bagi organisasi disabilitas perihal dukungan apa yang diperlukan selama COVID-19. Indah menjelaskan bagaimana awal mula program pelatihan bisnis kecil-kecilan di organisasinya berkembang:

“Teman-teman tuli bertemu secara online dan melalui pertemuan itu muncul percakapan untuk mengadakan pelatihan menjahit.”

Kami menemukan bukti bahwa beberapa organisasi disabilitas menanggapi kebutuhan anggota dan melatih anggotanya dalam kegiatan yang menghasilkan uang guna membantu mereka menghadapi pandemi. Indah menjelaskan bagaimana organisasinya melatih anggota yang tuli untuk menjahit tali pengait masker berhias manik-manik dan menciptakan bisnis:

“Awal Oktober, ada tiga orang tuli yang tertekan karena tidak ada pekerjaan selama pandemi. Dan saya menawarkan untuk mengajari mereka cara menjahit dan membuat tali masker. Saya mengajak mereka untuk pergi ke toko kelontong dan menunjukkan kepada mereka bahan-bahan yang bisa digunakan hanya dengan modal 100.000 rupiah. Sebelum pergi ke toko, saya mengajari mereka cara membuat tali masker dari manik-manik. Saya melatih mereka hanya dalam satu hari dan setelah itu mereka mempraktikkannya sendiri di rumah.”

Tampaknya banyak organisasi pendukung disabilitas bertindak selama pandemi karena hanya ada

sedikit atau tidak ada bantuan pemerintah. Organisasi disabilitas dapat dengan jelas melihat kebutuhan akibat pandemi dalam jaringan penyandang disabilitas mereka dan mengidentifikasi kesenjangan dalam penyediaan layanan. Indah mengatakan organisasinya membuat sebuah program karena anggota tuli kehilangan pekerjaan dan tidak ada kebijakan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah tersebut.

Organisasi disabilitas kreatif menggunakan sumber daya minimal untuk menyediakan dukungan maksimal. Indah menyampaikan strategi keuangan di balik program pelatihan pembuatan tali masker adalah dengan menggunakan modal terbatas yang disediakan oleh organisasi disabilitas (Rp125.000) untuk memulai program dan mendanai pelatihan awal anggota. Keuntungan dikembalikan ke dalam program dan digunakan untuk membantu anggota lain membeli bahan-bahan.

Dari tanggapan para narasumber, tampak bahwa program-program yang ditawarkan melalui organisasi disabilitas tidak secara eksplisit berfokus pada gender tertentu. Namun demikian, program-program tersebut memiliki efek gender. Salah satu contohnya adalah program menjahit yang ditawarkan oleh organisasi Indah. Hanya anggota perempuan yang ditawarkan pelatihan usaha kecil, meskipun sifat gender dari program tersebut tidak pernah disampaikan secara eksplisit. Indah menjelaskan:

“Untuk pelatihan menjahit, tidak ada laki-laki yang meminta untuk mengikuti pelatihan, tetapi jika ada laki-laki yang ingin bergabung, diperbolehkan. Karena tidak ada perbedaan siapa penyandang disabilitas tuli yang ingin mengikuti pelatihan, baik laki-laki maupun perempuan.”

Norma budaya yang kuat seputar peran gender membuat dampak dari program ini jadi sangat berbasis gender dan hanya anggota perempuan yang menerima manfaat dari pelatihan. Namun, sumber data tentang hal ini terbatas.

Dukungan materi, moral, dan pelatihan yang diberikan oleh organisasi disabilitas menjadi sentral dalam membantu penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan menghadapi pandemi COVID-19. Organisasi disabilitas berada di tempat yang tepat untuk memberikan dukungan karena hubungan dekat mereka dengan anggota. Dengan demikian, mereka dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan anggota. Namun, keterbatasan dana membuat mereka harus kreatif dalam memberikan dukungan. Kami juga mendapatkan sejumlah bukti bahwa program dukungan kemungkinan memiliki dampak gender yang tidak disengaja.

Dukungan dari pemerintah

Data kami menunjukkan bahwa dukungan pemerintah untuk penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan selama pandemi tidak konsisten dan tidak memadai. Namun, kami menemukan beberapa bukti skema bantuan yang berhasil. Banyak narasumber yang diwawancarai tidak menerima bantuan pemerintah dan bahkan tidak mengetahui informasinya sehingga terlambat untuk mendaftar. Hal ini disebabkan oleh anggaran yang tidak memadai, penyebaran informasi yang tidak efektif, dan kurangnya data penyandang disabilitas untuk mengetahui berapa banyak orang yang mungkin memerlukan bantuan, seperti yang akan dibahas berikut ini.

Penyandang disabilitas tidak memiliki akses yang setara terhadap bantuan pemerintah.

Bantuan pemerintah terhadap penyandang disabilitas tidak mempertimbangkan gender tetapi lebih fokus pada orang lanjut usia. Sementara itu, orang-orang yang bekerja di organisasi disabilitas tidak tahu bagaimana cara meminta bantuan dari lembaga non-pemerintah lainnya.

Penelitian cepat DPO menemukan bahwa hanya sebagian kecil narasumber yang mendapat manfaat dari program bantuan sosial pemerintah (subsidi listrik: 35,4 persen; subsidi air: 5,16 persen; bantuan tunai: 4,53 persen; bantuan makanan/nontunai: 11,36 persen; dan bantuan program keluarga harapan/transfer tunai bersyarat: 13,03 persen). Penelitian cepat DPO melaporkan bahwa penyerapan yang rendah diakibatkan oleh data kesejahteraan sosial yang tidak terintegrasi dengan baik dan pengecualian penyandang disabilitas sebagai kriteria yang mendapatkan bantuan.

Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian kami melaporkan bahwa hanya ada sedikit sekali bantuan pemerintah. Dalam beberapa kasus, bantuan tersebut memang tidak diperlukan. Fadhlán (tuli) tidak mendapatkan bantuan pemerintah karena ia masih bekerja di kafe dan tetap menerima upah. Annisa (gangguan pendengaran) tidak menerima bantuan pemerintah, tetapi sebagai mahasiswa dia tidak membutuhkannya karena masih disokong oleh orang tuanya.

Nurul (mantan penderita kusta) memang mendapat dukungan pemerintah. Dia masih terus menerima bantuan materi dari pemerintah provinsi (Bansos) untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarganya setelah pendapatannya berkurang hingga setengahnya dan merasa kesulitan membeli bahan makanan di pasar:

“Ada bantuan sosial. Setiap bulan masih berjalan. Ya, tentu

sangat bermanfaat, apalagi penghasilan saya menurun drastis. Sangat membantu, karena bantuannya makanan pokok, beras, dan telur. Sebenarnya ada juga ayam, tapi kalau saya ambil ayam, saya tidak dapat telur. Jadi sebagian besar teman saya mengambil telur. Barang-barang juga bisa ditukar dengan beras. Itu semua tergantung pada kebutuhan kita."

Jelas dari wawancara kami bahwa ada perempuan dan laki-laki penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan yang membutuhkan bantuan pemerintah tetapi tidak mendapatkannya selama pandemi. Salah satu contohnya adalah Putri (tuli) yang kehilangan sebagian besar pendapatannya ketika bisnis online-nya yang menjual kue dan mukena hampir berhenti total. Putri mengetahui ada Program Prakerja pemerintah yang mungkin saja bisa dia dapatkan tapi dia tidak mendaftar. Putri terisolasi dari dunia luar karena pandemi. Meskipun Putri memiliki keterampilan teknologi informasi yang sangat baik, ia tidak menerima bantuan pemerintah yang sangat ia butuhkan. Senada dengan itu, Indah (tuli) yang membantu menjalankan organisasi pendukung bagi komunitas tuli mengatakan, selama pandemi banyak orang tuli yang membutuhkan bantuan justru tidak mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah.

"... pernah ada teman tuli yang bekerja di perusahaan fast food tapi karena pandemi dia dirumahkan. Tidak ada kebijakan dari pemerintah daerah (untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan dan pekerjaan/pendapatan)."

Demikian pula Ahmad (gangguan penglihatan) yang mengalami penurunan pendapatan hingga 80 persen akibat pandemi. Dia

tahu sebagai mahasiswa dia bisa mendapatkan BLT 600 tetapi ia tidak mendaftar karena informasi yang tidak memadai.

"BLT, saya ingin sekali mendapatkannya, tetapi mungkin saat itu saya lambat memproses data saya dan jarang muncul di asrama. Jadi yang mengurus juga tidak mendaftarkan nama saya."

Narasumber menyampaikan bahwa tidak semua program dukungan pemerintah daerah memadai. Bantuan keuangan pemerintah seperti BST (Bantuan Sosial Tunai) dan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM, bantuan untuk UMKM) hanya berlangsung selama tiga bulan. Jangka waktu yang pendek ini membuat penerima dengan disabilitas bertahan tanpa bantuan yang diperlukan di bulan-bulan awal pandemi (Indah). Dukungan non-finansial pemerintah seperti pelatihan kerja juga terbatas. Indah menjelaskan:

"Belum pernah ada program pelatihan dari pemerintah. Hanya ada program bantuan tetapi tidak semua penyandang disabilitas tuli menerimanya. Program bantuan dari organisasi pemerintah daerah cukup baik, tetapi ada juga yang kualitasnya jelek."

Data kami jelas menunjukkan ada masalah terkait bagaimana program pemerintah dikomunikasikan kepada penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan. Bagi beberapa orang dengan jenis disabilitas yang membuat komunikasinya menjadi sulit (seperti tuli, gangguan pendengaran, buta, gangguan penglihatan), ini berarti mereka kehilangan bantuan pemerintah. Indah menjelaskan bahwa teman-teman tulinya di Grahita kemungkinan besar ketinggalan informasi.

"Karena sebagian besar teman Grahita tinggal di rumah dan

tidak berinteraksi dengan orang lain, akses informasi tidak sampai kepada mereka."

Ahmad mengaku jarang mengakses informasi resmi tentang COVID-19 secara daring. Banyak format situs web pemerintah yang menginformasikan pandemi tidak cocok dengan perangkat lunak yang digunakan Ahmad untuk mengakses internet.

"Untuk itu, saya hanya mengikuti informasi yang berskala nasional. Saya hanya mengakses data dalam skala yang lebih besar seperti Kota Makassar. Kalau skalanya lebih kecil, saya jarang mengaksesnya. Saya jarang mengakses situs covid19.go.id... Beberapa minggu terakhir saya enggan, karena perlu data tambahan, terutama karena pembaca layar tidak membaca informasi grafik yang ditampilkan di situs."

Sebelumnya kami menyebutkan bahwa orang tuli dan buta kesulitan untuk memahami komunikasi pemerintah selama pandemi tanpa penerjemah bahasa isyarat atau teks. Kegagalan mengakses informasi ini membuat penyandang disabilitas-komunikasi kehilangan bantuan pemerintah. Fadhlán tidak menerima bantuan pemerintah selama pandemi karena dia tidak mengetahuinya.

"Saya tidak mendapatkan informasi apa pun terkait bantuan tersebut. Teman saya menerimanya tetapi saya tidak. Kantor kecamatan tidak memberi saya informasi."

Narasumber yang diwawancarai mengidentifikasi cara penyampaian program sebagai suatu masalah. Bantuan keuangan pemerintah biasanya diberikan secara tidak langsung melalui organisasi pihak ketiga seperti Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (HPDI).

Indah adalah pengurus organisasi disabilitas yang bekerja dengan para penyandang disabilitas tuli di Makassar. HWDI meminta Indah untuk menyediakan data orang tuli penerima bantuan dari program distribusi sembako di komunitasnya. Artinya, bantuan pemerintah tidak selalu menjangkau penyandang disabilitas secara langsung selama pandemi. Indah berpendapat bahwa pemerintah harus bertemu dengan komunitas tuli secara langsung, bukan melalui pihak ketiga.

“Bantuan tunai langsung (BLT 600) diterima oleh satu orang tuli saja karena informasinya ia peroleh langsung dari RT (rukun tetangga). Namun sebagian besar tidak mengetahui informasi tersebut. Teman-teman tuli tidak mendapatkan informasi dari pemerintah daerah tentang pendaftaran BLT.”

Muncul pertanyaan tentang kecukupan data penyandang disabilitas yang dimiliki pemerintah. Indah berpendapat bahwa data yang tidak memadai merupakan alasan utama mengapa bantuan terkait pandemi dari pemerintah tidak seefektif seharusnya. Ketika dihubungi oleh organisasi pihak ketiga HWDI di masa pandemi untuk menyediakan data untuk bantuan pemerintah, Indah ragu-ragu:

“Biasanya HWDI meminta data distribusi sembako dan saya dihubungi untuk menyediakan data ini. Misalnya, ada lima orang tuli. Tapi saya tidak tahu data berapa banyak penyandang disabilitas yang dimiliki pemerintah atau apa tujuannya – dan biasanya datanya tidak sinkron.”

Sebaliknya, Intan, pegawai yang bekerja di Dinas Sosial Makassar, mengatakan:

“Dinas Sosial memiliki data penyandang disabilitas dan ada

juga petugas kesejahteraan sosial penyandang disabilitas yang melakukan pendataan. Data tersebut terhubung dengan sistem SimPD (Sistem Informasi Penyandang Disabilitas) dari Kementerian Sosial RI. Jadi kami punya datanya di Dinas Sosial.”

Bagaimanapun Intan mengakui bahwa ada kesenjangan dalam data, terutama perihal jenis disabilitas dan kebutuhan individu:

“Kalau soal data yang kita punya, masih belum dikembangkan dengan baik. Kami memiliki data tentang keragaman disabilitas tetapi belum memiliki, atau mengembangkan data tentang masalah atau kebutuhan penyandang disabilitas.”

Data yang baik membutuhkan biaya. Intan mengemukakan bahwa kesenjangan data disebabkan oleh anggaran yang tidak mencukupi:

“Dibutuhkan dana yang sangat besar jika kita ingin mengembangkan data mengenai penyandang disabilitas. Saat ini, kami masih mengumpulkan data melalui petugas kesejahteraan sosial.”

Wawancara kami dengan pejabat pemerintah di dua lokasi berbeda—Gowa dan Bulukumba—mendukung pernyataan Intan mengenai data yang belum dikembangkan sehingga menghambat dukungan pemerintah untuk penyandang disabilitas.

“Kami mengakui bahwa data yang kami miliki sejauh ini belum cukup detail yang memungkinkan kami dapat mengetahui secara pasti berapa banyak penyandang disabilitas di daerah kami, jenis disabilitas apa yang mereka miliki, di mana mereka tinggal atau latar belakang sosial

ekonomi mereka. Kami perlu berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan LSM yang bekerja dengan masalah disabilitas untuk mendapatkan data rinci ini.” (T, Dinas Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bulukumba)

“Data itu penting. Saat ini kami sedang berusaha meningkatkan ketersediaan dan kualitas data kami. Namun dibutuhkan waktu dan dana serta membutuhkan kerja sama yang erat dengan banyak organisasi, pemerintah atau LSM untuk mewujudkannya. Kami sedang bekerja ke arah itu.” (K, Dinas Sosial, Gowa).

Dana Desa merupakan salah satu contoh dukungan pemerintah yang efektif bagi penyandang disabilitas yang disebutkan oleh narasumber dari pemerintah dan LSM di Bulukumba. Dana Desa adalah program yang didanai pemerintah pusat yang memberikan uang langsung kepada pemerintah desa. Dana Desa awalnya ditujukan untuk pembangunan infrastruktur pedesaan dan selanjutnya untuk investasi dalam pembangunan manusia. Para narasumber menyampaikan bahwa Desa Kambuno di Bulukumba mengalokasikan sebagian Dana Desa mereka selama beberapa tahun terakhir, termasuk tahun ini, untuk mendukung populasi rentan, termasuk penyandang disabilitas. Diperlukan advokasi dan peningkatan kapasitas para pemimpin desa dan pemerintah untuk memungkinkan mereka menyesuaikan pengalaman Desa Kambuno dengan konteks di wilayah mereka masing-masing.

Data kami tidak cukup mengungkap responsivitas gender dari layanan bantuan pemerintah untuk penyandang disabilitas selama pandemi COVID-19. Indah menilai dukungan pemerintah tidak mempertimbangkan gender tetapi lebih diarahkan pada lansia

penyandang disabilitas. Namun, data nasional Indonesia terbaru memperlihatkan bahwa jumlah laki-laki yang menerima bantuan sosial sejak pandemi dimulai lebih tinggi daripada perempuan, yang mungkin terjadi karena respons kebijakan belum secara khusus menangani kebutuhan kelompok terpinggirkan, termasuk perempuan (Setyonaluri, 2020).

Data kami menunjukkan dua alasan mengapa dukungan pemerintah tidak memadai dan tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan. Yang pertama adalah masalah dalam mengkomunikasikan program pemerintah kepada penyandang disabilitas, dan yang kedua adalah masalah pengumpulan data. Penelitian cepat DPO juga mengidentifikasi pengecualian disabilitas sebagai kriteria penerima bantuan sebagai alasan lain rendahnya penyerapan bantuan pemerintah oleh penyandang disabilitas. Masalah-masalah ini mungkin berasal dari anggaran pemerintah yang tidak memadai untuk membantu kelompok disabilitas. Bantuan pemerintah tidak mempertimbangkan gender tetapi lebih ditujukan kepada lansia penyandang disabilitas. Di sisi lain, penyandang disabilitas memiliki akses yang tidak setara terhadap bantuan pemerintah.

Sebagai kesimpulan, dukungan dari komunitas, keluarga, dan organisasi penyandang disabilitas sangat penting untuk menyokong penyandang disabilitas selama pandemi, baik perempuan maupun laki-laki. Bantuan pemerintah untuk penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan tidak konsisten dan tidak memadai, tetapi kami menemukan beberapa contoh bantuan yang menjanjikan. Dari sampel kami, kami tidak dapat mengidentifikasi perbedaan gender tertentu dalam penyaluran bantuan ini, meskipun data nasional

menunjukkan bahwa dibandingkan laki-laki, lebih banyak perempuan yang tidak mendapatkan bantuan pemerintah. Mengingat apa yang telah kita ketahui tentang rentannya kondisi keuangan perempuan, terutama perempuan penyandang disabilitas, terbatasnya bantuan pemerintah kemungkinan akan berdampak lebih parah bagi perempuan penyandang disabilitas.

Penelitian cepat DPO melaporkan perlunya bantuan yang signifikan dari pemerintah bagi penyandang disabilitas dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kami juga telah mengidentifikasi suatu peran untuk tindakan cepat pemerintah di Sulawesi Selatan dalam upaya memulihkan pendapatan yang turun signifikan yang dialami penyandang disabilitas akibat pandemi, baik laki-laki maupun perempuan.

3.4. PENGUATAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM COVID-19, GENDER, DAN DISABILITAS DI SULAWESI SELATAN

Dengan mempertimbangkan temuan-temuan tersebut, kebutuhan untuk memperkuat kebijakan dan program menjadi sangat jelas. Hal ini untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas—terutama perempuan—tidak terkena dampak COVID-19 dan mengalami situasi genting di kemudian hari secara tidak proporsional. Kebijakan dan inisiatif perlu ditingkatkan di seluruh pemerintah kabupaten dan pusat, serta di industri seperti media dan pendidikan tinggi. Area utama yang kami identifikasi perlu ditangani adalah penggunaan format informasi yang dapat diakses, pengumpulan data, dukungan dan bantuan pemerintah dalam penyediaan kebutuhan. Organisasi disabilitas sudah melakukan tugas penting, yakni

mengurangi dampak pandemi, yang harus didukung dengan peningkatan pendanaan. Kebijakan COVID-19 yang memperhatikan jenis disabilitas dan sensitif gender harus diperkenalkan di berbagai lembaga pemerintah.

Peningkatan penggunaan format informasi yang dapat diakses

Banyak masalah yang dihadapi penyandang disabilitas selama pandemi disebabkan oleh penggunaan format informasi yang tidak dapat diakses. Ketiadaan format yang ramah disabilitas ini muncul di berbagai sektor termasuk media, platform komunikasi pemerintah, pendidikan tinggi, dan tempat kerja. Format ramah disabilitas harus digunakan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan informasi yang memadai mengenai COVID-19 sehingga dapat meminimalkan dampak pandemi pada pendidikan dan pekerjaan mereka. Sangat penting bagi siaran media nasional dan lokal serta semua konferensi pers pemerintah terkait COVID-19 untuk menyertakan teks atau penerjemah bahasa isyarat. Dengan demikian orang tuli atau mereka yang mengalami gangguan pendengaran mendapatkan informasi mengenai langkah-langkah pencegahan COVID-19, klinik tes COVID-19, peraturan, dan regulasi. Demikian pula, format teks seperti situs web pemerintah perlu membuat elemen visual seperti peta dan grafik yang dapat diakses oleh orang-orang yang menggunakan pembaca layar dan yang memiliki kebutuhan aksesibilitas visual lainnya. Mendapatkan informasi tentang COVID-19 secara memadai berpengaruh besar dalam mengurangi tingkat kecemasan para penyandang disabilitas, meminimalkan risiko berurusan dengan polisi dan kemungkinan menghadapi tindakan hukuman seperti denda akibat melanggar peraturan selama pandemi.

Menerapkan format yang dapat diakses juga akan menguntungkan penyandang disabilitas yang tetap bekerja atau masih melanjutkan pendidikan. Para siswa melaporkan hambatan yang signifikan dalam pembelajaran daring. Kelas dan kuliah zoom, serta metode pengajaran daring lainnya harus dapat diakses sehingga siswa penyandang disabilitas tidak didiskriminasi atau 'tertinggal' akibat COVID-19.

Cara-cara inovatif yang dilakukan penyandang disabilitas untuk menghindari hambatan komunikasi, misalnya dengan meminta pelanggan yang memakai masker untuk menuliskan pesanan makanan. Cara ini harus didukung dengan mempromosikan kesadaran yang lebih luas bahwa berbagai bentuk komunikasi tersebut sama-sama berterima. Selain itu, masker dengan plastik transparan di bagian mulut telah diperkenalkan di negara lain dan bisa menjadi inovasi berguna untuk memastikan para penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan yang harus membaca bibir dapat memahami rekan kerja dan pelanggan.

Beberapa peserta penelitian menganggap sosialisasi secara luas format-format komunikasi yang dapat diakses sebagai perubahan paling penting yang perlu dilakukan. Ketika ditanya jenis dukungan apa yang senantiasa dia butuhkan, Fadhlani menjawab dengan satu saran: "Penerjemah bahasa isyarat atau orang yang bisa menjelaskan sesuatu kepada orang tuli untuk menyampaikan informasi." Pentingnya kebutuhan mendapatkan informasi yang tepat mengenai sifat dan implikasi virus tidak dapat dianggap berlebihan.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah area yang berbeda. Namun menurut peserta penelitian kami, baik yang bekerja di pemerintahan

maupun yang terlibat dalam organisasi disabilitas, area ini perlu ditingkatkan. Pendanaan pemerintah yang tidak memadai telah menyebabkan banyak keterbatasan dalam pengumpulan data disabilitas. Temuan kami menunjukkan bahwa pengumpulan data lebih difokuskan pada pendokumentasian jumlah dan jenis disabilitas di Sulawesi Selatan. Data pemerintah tidak mengidentifikasi kebutuhan, keinginan, atau hambatan yang dihadapi para penyandang disabilitas.

Para peserta yang diwawancarai juga menyampaikan bahwa pemerintah sering kali mengandalkan data organisasi disabilitas dan tidak melakukan pengumpulan data sendiri. Harus dialokasikan pendanaan yang lebih besar untuk pengumpulan data khusus disabilitas sehingga didapatkan catatan akurat mengenai beragam kebutuhan serta pengalaman penyandang disabilitas. Penting juga untuk mengumpulkan data yang komprehensif sebagai "dasar penerapan kebijakan penyaluran bantuan yang berasal dari data yang kami kumpulkan" (Intan, Dinas Sosial, Makassar), sehingga dapat diberikan bantuan dan dukungan yang tepat. Data yang tidak akurat merupakan penyebab utama bantuan dan dukungan tidak menjangkau banyak penyandang disabilitas di wilayah tersebut.

Bantuan pemerintah

Temuan kami juga menunjukkan beberapa cara lain untuk meningkatkan bantuan sosial pemerintah. Pertama, jelas bahwa jangka waktu untuk mengajukan bantuan keuangan terlalu singkat. Jangka waktu yang memungkinkan para penyandang disabilitas dapat mengajukan permohonan bantuan langsung tunai (BLT) dan bentuk bantuan lainnya harus diperpanjang. Dengan demikian, tidak seorang

pun yang membutuhkan bantuan keuangan terlambat mendaftar, dan organisasi disabilitas memiliki cukup waktu untuk menginformasikan kepada anggota bahwa bantuan tersedia serta dapat membantu mereka mengajukan permohonan. Bantuan harus diberikan secara bergilir. Diperlukan komitmen untuk melanjutkan ke kehidupan 'kenormalan baru' sampai vaksin diproduksi dan didistribusikan, dan penyandang disabilitas dapat melanjutkan pekerjaan mereka seperti biasa serta memperoleh kembali pendapatan mereka seperti sebelumnya.

Subsidi juga perlu ditingkatkan. Penelitian cepat menunjukkan rendahnya ketersediaan subsidi untuk air dan listrik. Para peserta yang diwawancarai melaporkan kesulitan untuk membayar tagihan serta melaporkan bahwa ada orang lain dengan disabilitas telah diputus air dan listriknya. Pemerintah juga harus menawarkan subsidi internet, termasuk bantuan untuk paket data telepon seluler. Dari tanggapan para peserta penelitian, terlihat jelas bahwa memiliki akses internet yang konsisten dan dapat diandalkan sangat penting untuk dapat menggunakan teknologi, seperti aplikasi transkripsi, pembuat teks web, dan situs web yang dapat diakses, yang merupakan metode umum dalam mengatasi hambatan informasi.

Organisasi disabilitas melaporkan bahwa masalah utama bantuan pemerintah adalah distribusi yang tidak merata. Sebagian besar disebabkan oleh pengumpulan data yang tidak memadai, yang ujung-ujungnya berasal dari anggaran yang rendah. Pengumpulan data yang lebih baik dan lebih komprehensif akan membantu memastikan orang-orang yang membutuhkan bantuan menerimanya. Indah menyarankan pemberi bantuan berkoordinasi

langsung dengan organisasi disabilitas dan melibatkan mereka dalam proses distribusinya. Organisasi penyandang disabilitas berada di posisi yang tepat untuk mengetahui apa yang dibutuhkan anggotanya. Pemerintah harus bekerja sama dengan organisasi-organisasi ini untuk mendistribusikan bantuan yang dibutuhkan secara tepat.

Penyediaan kebutuhan

Kebutuhan seperti bahan makanan juga harus dipasok untuk penyandang disabilitas. Meskipun bantuan keuangan ditingkatkan dan didistribusikan secara merata, tetapi untuk dapat mengakses pasar, terutama bagi penyandang disabilitas fisik tertentu, tetap sulit dan dalam beberapa kasus bahkan tidak mungkin. Temuan kami juga mengungkapkan bahwa pergi ke tempat umum merupakan sumber ketakutan dan kecemasan. Layanan pengiriman ke rumah akan membantu meminimalkan kekhawatiran, yang khususnya dilaporkan oleh perempuan perihail tertular COVID-19 di tempat umum. Ini juga akan mengurangi kelelahan yang terkait dengan keharusan berbelanja dan mengangkut bahan makanan dalam jumlah besar, akibat frekuensi berbelanja yang berkurang akibat akses pasar yang terbatas. Layanan pengiriman juga akan membantu mereka yang berpenghasilan rendah dan mengurangi kecemasan mengenai sumber bahan pangan. Ponsel juga harus disediakan bagi warga yang tidak memiliki atau bagi yang memerlukan upgrade ponsel. Ketika ditanya bantuan lebih lanjut apa yang dibutuhkan, Ahmad menjawab, "Ponsel. Ponsel saya tidak dapat menjalankan banyak aplikasi meskipun ada penyimpanannya." Dengan menyediakan teknologi ini akan memungkinkan penyandang disabilitas dapat terus mengakses informasi melalui aplikasi dan program.

Mendukung kerja Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas

Temuan kami menunjukkan bahwa organisasi disabilitas melakukan pekerjaan luar biasa untuk membantu komunitas mereka bertahan selama pandemi. Para narasumber yang diwawancarai menyebutkan beberapa inisiatif penting, termasuk distribusi hand sanitizer dan masker, program peningkatan pendapatan seperti produksi dan penjualan masker, serta kelompok dukungan (*support group*) secara daring. Pekerjaan yang mereka lakukan harus didukung lebih lanjut melalui pendanaan pemerintah sehingga skema bantuan dapat tetap berjalan seiring dengan berlanjutnya pandemi dan situasi yang memburuk di banyak daerah. Subsidi paket internet ponsel juga akan membantu partisipasi berkelanjutan dalam kelompok dukungan daring.

Selain meningkatkan inisiatif organisasi disabilitas yang sudah ada, program baru juga dapat diperkenalkan. Kami mendapati bahwa pembuatan dan distribusi masker, meskipun tidak dimaksudkan sebagai inisiatif berbasis gender, namun memiliki efek gender, dengan hanya perempuan yang berpartisipasi. Inisiatif peningkatan pendapatan lainnya dapat dirancang untuk laki-laki, dengan fokus pada kegiatan yang tidak terkait erat dengan peran gender. Cara ini idealnya akan menghasilkan partisipasi gender yang lebih setara dalam aktivitas bantuan COVID-19.

Temuan kami juga menunjukkan bahwa organisasi disabilitas akan mendapat manfaat jika mendapatkan pelatihan cara mengajukan permohonan bantuan dari LSM dan lembaga swasta. Indah, ketua organisasi disabilitas di Makassar, mengaku tidak tahu bagaimana cara mengajukan proposal ke pihak swasta. Membantu organisasi

dengan memberikan pelatihan pembuatan proposal bantuan akan menciptakan lebih banyak sumber daya tersedia untuk mengajukan permohonan bantuan COVID-19.

Terakhir, organisasi disabilitas harus diberi lebih banyak dana untuk menjangkau orang-orang yang saat ini belum mereka identifikasi. Temuan kami menunjukkan bahwa kelompok/ organisasi seperti itu sebagian besar membantu dan berinteraksi dengan orang-orang yang sudah mengetahui aktivitas organisasi. Indah menjelaskan:

"...organisasi ini hanya fokus pada penyandang tuli yang datang untuk melaporkan... kesulitan yang mereka hadapi."

Namun, tampaknya masih banyak lagi penyandang disabilitas yang tidak mengetahui dukungan dan bantuan yang dapat mereka akses. Pendanaan tambahan yang ditujukan untuk kampanye dan peningkatan kesadaran dapat membuat lebih banyak penyandang disabilitas mendapatkan akses ke bantuan yang dapat menyelamatkan jiwa.

Pengembangan kebijakan disabilitas-spesifik

Para narasumber yang diwawancarai melaporkan bahwa pemerintah saat ini tidak memiliki kebijakan COVID-19 untuk disabilitas-spesifik, yang menyasar pada jenis disabilitas tertentu. Namun pegawai pemerintah telah mengindikasikan bahwa sedang dilakukan rencana untuk dimulai tahun ini. Kebijakan yang diusulkan ini kemungkinan akan "mencakup pemberdayaan, rehabilitasi, dan pengembangan keterampilan" (Intan, Dinas Sosial, Makassar). Kebijakan ini harus sensitif terhadap gender. Sementara rehabilitasi dan pengembangan keterampilan adalah program jangka panjang yang berguna, pandemi telah menciptakan kebutuhan materi



Foto oleh Steven HWG lewat [Unsplash](#)

yang mendesak dan segera bagi penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan. Penting juga bahwa kebijakan tersebut harus mencakup program tambahan pendapatan dan distribusi bantuan materi, sebagaimana sudah dibahas sebelumnya.

Kebijakan disabilitas-spesifik dan inklusif gender juga harus dimasukkan ke dalam program kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Saat ini pendekatan BNPB masih luas dan tidak fokus pada bagaimana COVID-19 memengaruhi secara spesifik kepada penyandang disabilitas, terutama perempuan. Sebagaimana dikatakan Arif, seorang pegawai BNPB:

“BNPB ini khusus untuk mitigasi dan penanggulangan bencana. Tugas utama kami adalah bagaimana meminimalkan dampak bencana, baik yang

terkena dampak adalah penyandang disabilitas maupun non disabilitas.”

Meskipun BNPB melaporkan bahwa tindakan-tindakan yang menangani disabilitas tertentu telah diperkenalkan oleh lembaga lain dan pemerintah daerah, termasuk “bantuan sosial, bantuan untuk fasilitas dan infrastruktur kursi roda dan sebagainya”, Arif menyampaikan bahwa lembaganya “tidak secara langsung berhubungan dengan penyandang disabilitas.”

Ketika ditanya apakah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh BNPB dapat diakses oleh mereka yang memiliki gangguan pendengaran, Arif menjawab bahwa pada saat ini tidak dapat diakses. Tetapi sedang dilakukan rencana untuk membuatnya dapat diakses:

“Kami berencana untuk bekerja sama dengan SLB (Sekolah Luar Biasa) untuk menerapkan metode terbaik

untuk mengadakan pertemuan dengan orang-orang yang mengalami gangguan pendengaran. Dan kami telah mengatur untuk mengusulkan kerja sama ini sebagai bagian dari rencana kerja kami tahun depan.”

Merupakan hal yang penting bahwa suatu badan tanggap bencana dapat diakses, diinformasikan, dan mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam semua aspek kerja mereka. Penelitian global menunjukkan bencana dan wabah penyakit berdampak pada penyandang disabilitas dengan cara yang berbeda. Jika organisasi kunci yang terlibat dalam menanggapi bencana dan pandemi tidak menyadari dampak ini, maka kemungkinan konsekuensi COVID-19 akan semakin buruk dan para penyandang disabilitas akan berada dalam situasi yang kian genting.



4.0. REKOMENDASI

Studi kami mengidentifikasi tujuh masalah atau ketegangan utama untuk dipertimbangkan, yang berkaitan dengan 14 rekomendasi utama. Sementara setiap ketegangan memengaruhi pengalaman sehari-hari perempuan dan laki-laki yang hidup dengan disabilitas di Sulawesi Selatan, ketegangan-ketegangan tersebut dapat dipahami pada dua tingkat, yaitu mikro (individu dan keluarga) dan makro (komunitas disabilitas dan penduduk Sulawesi Selatan secara keseluruhan).

Sumber daya pemerintah Indonesia telah terkuras selama pandemi karena berusaha semaksimal mungkin menyediakan dukungan kesehatan dan ekonomi kepada warganya yang sangat beragam melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Beberapa rekomendasi yang kami berikan hanya memerlukan biaya minimal atau tanpa biaya. Rekomendasi-rekomendasi kami mencakup peningkatan cara pemerintah memberikan layanan, misalnya melalui metode komunikasi yang lebih inklusif, perpanjangan jangka waktu pendaftaran untuk skema bantuan keuangan yang sudah tersedia, atau memberikan pertimbangan yang lebih besar terhadap kebijakan-kebijakan khusus gender dan disabilitas-spesifik dalam program kerja tanggap bencana milik pemerintah. Penyediaan layanan pemerintah yang memadai dan sensitif gender bagi penyandang disabilitas lebih merupakan sebuah komitmen untuk inklusivitas dan untuk bekerja dengan penyandang disabilitas karena itu berarti meningkatnya pendanaan.

Rekomendasi lain memang memerlukan biaya, seperti subsidi yang lebih besar untuk penyediaan layanan vital dan bahan makanan, serta pengumpulan data baru. Meskipun biaya pelaksanaan rekomendasi ini akan besar di

tingkat nasional dan daerah/provinsi, tetapi menurut kami biaya sosial, ekonomi, dan kesehatan dari tidak melaksanakan rekomendasi ini akan lebih besar. Melaksanakan rekomendasi ini merupakan investasi yang baik menggunakan dana publik yang terbatas untuk memfokuskan anggaran pada kelompok yang paling rentan. Dengan bertindak cepat untuk mengurangi pengucilan yang dihadapi para penyandang disabilitas selama pandemi, pemerintah Indonesia dapat mencegah jenis-jenis kerugian yang akan menimbulkan biaya jangka panjang dalam sistem layanan kesehatan, penyediaan layanan sosial, sistem pendidikan dan sistem keadilan pada kejahatan.

4.1. KETEGANGAN TINGKAT MIKRO

Ketegangan tingkat mikro berada di dalam rumah tangga serta di tingkat individu dan keluarga. Penelitian kami mengidentifikasi empat ketegangan tingkat mikro yang konsisten memengaruhi kebutuhan dan dukungan dasar sehari-hari bagi perempuan dan laki-laki yang hidup dengan disabilitas di Sulawesi Selatan selama pandemi.

Rekomendasi 1:

Tingkatkan metode komunikasi sehingga penyampaian informasi penting tentang kesehatan dan keselamatan mencakup kebutuhan orang-orang yang memiliki gangguan bicara, pendengaran, atau penglihatan.

Komunikasi yang tidak dapat diakses berarti banyak perempuan dan laki-laki penyandang disabilitas gagal menerima informasi kunci mengenai pandemi. Hal ini juga membuat beberapa orang tidak dapat mendapatkan informasi mengenai skema bantuan penting secara tepat waktu, dan membuat kegiatan bekerja dan belajar selama pandemi menjadi sangat sulit.

Siaran media lokal dan nasional serta semua konferensi pers pemerintah mengenai virus corona harus menyertakan teks atau penerjemah bahasa isyarat sehingga orang tuli atau mereka yang mengalami gangguan pendengaran dapat mengetahui langkah-langkah pencegahan COVID-19, klinik untuk tes, dan informasi terbaru tentang peraturan dan regulasi selama pandemi. Demikian pula format teks seperti situs web pemerintah perlu membuat elemen visual seperti peta dan grafik yang dapat diakses oleh orang-orang yang menggunakan pembaca layar dan yang memiliki kebutuhan aksesibilitas visual lainnya. Kampanye peningkatan kesadaran mengenai penggunaan metode komunikasi yang berbeda-beda harus difasilitasi oleh pemerintah dan media.

Rekomendasi 2:

Memperluas skema subsidi pemerintah untuk memastikan para penyandang disabilitas tetap memiliki akses ke layanan dasar seperti air, listrik, dan komunikasi.

Banyak narasumber yang diwawancarai berbicara mengenai rendahnya ketersediaan subsidi untuk air, listrik, dan telekomunikasi (lihat bagian 3.3.3). Ketika kebutuhan-kebutuhan dasar ini tidak disubsidi, penyandang disabilitas yang menghadapi kesulitan ekonomi dapat mengalami pemadaman listrik dan air atau membuat kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam pekerjaan, pendidikan, atau berkomunikasi dengan teman dan keluarga menjadi terhambat.

Bantuan dalam bentuk subsidi perlu diperluas. Subsidi harus fokus pada kebutuhan utama yang secara langsung memengaruhi kehidupan rumah tangga dan partisipasi sosial para penyandang disabilitas, termasuk air, listrik, internet, dan telekomunikasi.



Foto oleh Arisa Chattasa lewat [Unsplash](#)

Rekomendasi 3:

Perpanjang jangka waktu untuk akses ke bantuan tunai dan bantuan keuangan lainnya sampai penyandang disabilitas dapat memulihkan kembali pendapatan mereka seperti sebelumnya.

Bantuan keuangan pemerintah dimaksudkan untuk membantu meringankan sebagian kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan (lihat bagian 3.3.3). Tetapi jangka waktu untuk mengajukan permohonan bantuan seringkali terlalu pendek. Para peserta penelitian melaporkan bahwa mereka, atau orang-orang yang mereka kenal, tidak dapat mendaftar karena tenggat waktunya telah lewat, atau bahkan tidak menyadari bahwa sebenarnya tersedia bantuan untuk mereka.

Jangka waktu untuk mengajukan permohonan bantuan langsung tunai (BLT) dan bentuk bantuan lainnya harus diperpanjang. Dengan demikian tidak ada orang yang membutuhkan dukungan keuangan yang tidak mendapatkannya dan organisasi disabilitas memiliki cukup waktu untuk menginformasikan kepada anggota dan membantu mereka mengajukan permohonan. Bantuan keuangan harus ditawarkan secara

bergilir, dengan komitmen untuk melanjutkan kehidupan 'normal baru' sampai vaksin diproduksi dan didistribusikan, serta penyandang disabilitas dapat melanjutkan pekerjaan mereka seperti biasa dan memulihkan kembali pendapatannya seperti semula.

Kebutuhan dasar tidak mencukupi

Kebutuhan seperti bahan makanan juga harus diberikan kepada penyandang disabilitas (lihat bagian 3).

Rekomendasi 4:

Menyediakan layanan pengiriman makanan termasuk pengiriman barang-barang kebutuhan pokok (sembako) bagi orang-orang yang tidak dapat berbelanja sendiri.

Bahkan jika bantuan keuangan ditingkatkan dan didistribusikan secara merata, keadaannya tetap sulit, dan dalam beberapa kasus justru tidak mungkin, khususnya bagi perempuan penyandang disabilitas fisik tertentu, untuk mengakses pasar. Barang-barang kebutuhan pokok seperti sembako harus diberikan kepada penyandang disabilitas pada saat keadaan darurat seperti pandemi COVID-19. Dukungan ini membutuhkan perluasan layanan pengiriman ke rumah.

4.2. KETEGANGAN TINGKAT MAKRO

Penelitian kami mengidentifikasi tiga ketegangan tingkat makro yang memengaruhi kebutuhan sehari-hari dan dukungan bagi perempuan dan laki-laki penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan. Ketegangan di tingkat makro terjadi dalam komunitas disabilitas dan penduduk Sulawesi Selatan pada umumnya.

Rekomendasi 5

Kumpulkan data yang komprehensif untuk distribusi bantuan dan dukungan organisasi yang lebih tepat sasaran.

Para peserta yang diwawancarai yang bekerja di pemerintahan dan organisasi disabilitas sama-sama menyadari keterbatasan dalam proses pengumpulan data saat ini (lihat bagian 3.3.3). Ini termasuk badan pemerintah yang mengumpulkan data tentang jumlah penyandang disabilitas di masyarakat, atau jenis disabilitasnya, tetapi tidak mendokumentasikan faktor-faktor seperti kebutuhan dukungan dan pelayanan penyandang disabilitas di masyarakat. Terdapat juga keterbatasan jumlah data yang dikumpulkan oleh lembaga

pemerintah melalui mekanisme resmi, sehingga mengakibatkan distribusi bantuan pemerintah selama pandemi tidak merata. Sangat penting untuk memastikan bahwa yang dikumpulkan adalah data komprehensif sehingga badan-badan pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi disabilitas terkait data-data tersebut.

Rekomendasi 6

Berhubungan dengan organisasi disabilitas yang lebih banyak menanggung beban serta memperkuat upaya mereka dengan pendanaan dan pelatihan.

Temuan kami menunjukkan bahwa organisasi disabilitas melakukan pekerjaan luar biasa

untuk membantu komunitas mereka menghadapi pandemi ini dan mereka perlu mendapatkan dukungan lebih lanjut. Inisiatif organisasi disabilitas yang telah ada dan baru muncul—seperti distribusi hand sanitizer dan masker, program peningkatan pendapatan seperti produksi dan penjualan masker, serta kelompok dukungan daring—harus didukung dengan dana dan sumber daya pemerintah. Dana yang lebih banyak juga akan membantu organisasi disabilitas menjangkau lebih banyak orang baru. Staf dan relawan organisasi disabilitas pun membutuhkan lebih banyak pelatihan dalam hal mengajukan permohonan pendanaan serta bantuan dari LSM dan lembaga swasta.

Rekomendasi 7

Memasukkan kebijakan khusus disabilitas dan gender ke dalam program kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Dengan rencana yang sedang berjalan untuk memperkenalkan kebijakan disabilitas pada tahun 2021, penting untuk menangani tantangan umum yang dihadapi penyandang disabilitas selama pandemi dan tantangan-tantangan lain yang mereka hadapi bersama penduduk Sulawesi Selatan lainnya. Kebijakan khusus disabilitas dan gender harus dimasukkan ke dalam program kerja BNPB dan bahwa badan ini harus dapat diakses, diinformasikan oleh penyandang disabilitas, serta mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam semua aspek kerja mereka.



Foto oleh Kevin André lewat [Unsplash](#)

5.0. REFERENSI

Chappell, A.L., Goodley, D., and Lawthom, R., 'Making connections: the relevance of the social model of disability for people with learning difficulties', *British Journal of Learning Disabilities*, vol. 29, 2001, pp. 45-50.

Creswell, J. and Creswell, D., *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, 5th edn., Thousand Oaks, CA, Sage, 2018.

Dados, N. and Connell, R., 'The Global South', *Contexts*, vol. 11, no. 1, 2012, pp. 12-13.

Davies, S.G., *Gender Diversity in Indonesia*, New York, Routledge, 2010.

Oliver, M., 'The social model of disability: thirty years on', *Disability and Society*, vol. 28, no. 7, 2013, pp. 1024-1026.

Plan International, *Leaving no girl behind: the impact of COVID-19 on girls and young women with disabilities*, Plan International, 2020, <https://www.plan.org.au/publications/leaving-no-girl-behind/>, (viewed 29 October 2020).

Setyonaluri, D., 'In Indonesia, the COVID-19 pandemic hurts poor women the most', *The Conversation Indonesia*, 22 September 2020, <https://theconversation.com/in-indonesia-the-covid-19-pandemic-hurts-poor-women-the-most-145694>.

UN Department of Economic and Social Affairs, *UN/DESA Policy Brief 69: Leaving no one behind: the COVID-19 crisis through the disability and gender lens*, UN Department of Economic and Social Affairs, 2020, <https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-des-a-policy-brief-69-leaving-no-one-behind-the-covid-19-crisis-through-the-disability-and-gender-lens/>, (viewed 10 November 2020).

UN Women, *From Insight to Action: Gender Equality in the Wake of COVID-19*, New York, UN Women, 2020, https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/COVID19/Unlocking_the_lockdown_UNWomen_2020.pdf, (viewed 10 November 2020).

Catatan: Kutipan asli dari para peserta dalam laporan ini telah diterjemahkan dari laporan asli berbahasa Inggris dan kemudian diedit secara ringan untuk memperjelas informasi.



Foto oleh Gervyn Louis lewat [Unsplash](#)



MITRA KEBIJAKAN:



MITRA UNTUK DAMPAK:

THE CONVERSATION

KNOWLEDGE
SECTOR INITIATIVE

openlearning

Tim Manajemen Program:

Dr Eugene Sebastian,
Direktur Program PAIR
Helen Fletcher-Kennedy,
Kepala Operasional AIC
Dr Leonardo Pegoraro,
Manajer Program PAIR
Dr Hasnawati Saleh,
Koordinator Riset PAIR
Dr Martijn van der Kamp,
Koordinator Pengembangan
Kapabilitas Tim Peneliti PAIR
Marlene Millott,
Manajemen Program PAIR
Fadhilah Trya Wulandari,
Manajemen Program PAIR

Dewan Penasihat Riset:

Anna McNicol,
Penasihat Menteri Bidang
Ekonomi, Investasi, dan
Infrastruktur, Kedutaan Besar
Australia di Jakarta
Profesor Budu,
Tim Gubernur untuk
Percepatan Pembangunan
Provinsi Sulawesi Selatan
(TGUPP)
Bronwyn Robbins,
Konsul Jenderal Australia
di Makassar
Dr Elan Satriawan,
Ketua Kelompok Kerja
Kebijakan, Tim Nasional
untuk Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K)
Dr(HC) Erna Witoelar,
Mantan Duta Besar
Khusus PBB untuk Tujuan
Pembangunan Milenium
(MDGs) di Asia Pasifik
Dr Eugene Sebastian,
Direktur Eksekutif, The
Australia-Indonesia Centre
Dr Hasnawati Saleh,
Koordinator Riset PAIR, The
Australia- Indonesia Centre
Profesor Heri Hermansyah,
Direktur Riset dan
Pengabdian Masyarakat,
Kementerian Riset dan
Teknologi, Republik Indonesia

Dr Ishak Salim, Pendiri
Pergerakan Difabel Indonesia
untuk Kesetaraan (PerDIK)
Profesor Jamaluddin Jompa,
Penasihat Ekologi
Kelautan untuk Menteri
Kelautan dan Perikanan,
Republik Indonesia
Jana Hertz, Team Leader,
Knowledge Sector Initiative,
Indonesia
Muhammad Sani Azis,
Koordinator Wilayah Sulawesi
Selatan, Asosiasi Rumpit
Laut Indonesia (ARLI)
Dr Musdhalifah Machmud,
Deputi Bidang Pangan dan
Agribisnis, Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian,
Republik Indonesia
Prakosa Hadi Takariyanto,
Direktur Teknik,
PT Pelabuhan Indonesia IV
(Persero)
Pratiwi Hamdhana,
Pendiri dan Direktur Tenoon,
dan Driver Engagement
Gojek Makassar
Profesor Wihana Kirana Jaya,
Staf Khusus Urusan Ekonomi
dan Investasi Transportasi,
Menteri Perhubungan,
Republik Indonesia

Ucapan Terima Kasih:

Australia-Indonesia Centre
(AIC) mengucapkan terima
kasih kepada Pemerintah
Australia atas dukungannya
untuk Program Kemitraan
Riset Australia-Indonesia
(PAIR) melalui Departemen
Luar Negeri dan Perdagangan
Australia. AIC juga berterima
kasih atas dukungan
Pemerintah Indonesia untuk
PAIR melalui Kementerian
Riset dan Teknologi
Republik Indonesia.

Para peneliti juga ingin
mengucapkan terima kasih
kepada organisasi dan
institusi berikut atas dukungan
mereka pada penelitian ini:

1. Pergerakan Difabel
Indonesia untuk
Kesetaraan (PerDIK)
2. Dinas Sosial
Kota Makassar
3. Dinas Sosial
Kabupaten Bulukumba
4. Dinas Sosial
Kabupaten Gowa
5. Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Kota Makassar



